



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **28** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa Kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran miskin serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; maka sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- b. bahwa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan kelembagaan dan Sumber daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah disusun sebagai penjabaran dari strategi dan program Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Pembangunan Daerah dalah rangkaian penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di kabupaten Konawe.
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.



6. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan yang berisi rangkaian program dan kegiatan yang dilanjutkan secara sinergis oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui jaminan bantuan social, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan perekonomian.
7. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe.
9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Konawe.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan suatu daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat dengan P3KE adalah data yang disusun oleh Pemerintah untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin dan rentan secara lebih akurat guna memastikan penyaluran bantuan social tepat sasaran.

BAB II RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RKPD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 3

(1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I : pendahuluan;
- b. bab II : gambaran umum kondisi Daerah;
- c. bab III : profil kemiskinan Daerah;
- d. bab IV : prioritas program;
- e. bab V : lokasi prioritas; dan
- f. bab VI : penutup.



- (2) pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar belakang, dasar hukum dan kebijakan operasional, tujuan, dan sistematika penulisan.
- (3) Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat aspek geografi, aspek demografi, pembangunan manusia, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor ketenagakerjaan dan gambaran pembangunan infrastruktur di daerah.
- (4) Profil Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat kondisi umum kemiskinan daerah, analisis karakteristik masalah kemiskinan konsumsi, analisis karakteristik masalah ketenagakerjaan, analisis karakteristik masalah bidang kesehatan, analisis karakteristik masalah bidang pendidikan, analisis karakteristik masalah bidang infrastruktur dasar dan analisis karakteristik masalah bidang ketahanan pangan.
- (5) Prioritas Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat analisis akar masalah (*Determinan*), analisis kondisi fiskal, analisis faktor pendorong dan penghambat intervensi dan strategi penanggulangan kemiskinan.
- (6) Lokasi Prioritas Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat prioritas wilayah berdasarkan jumlah individu berdasarkan data P3KE dan Indeks Desa Membangun.
- (7) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

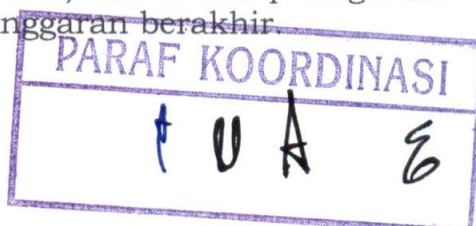
Pasal 4

RKPD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.



BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengilkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024-2029 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 250) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SEKDA	U
2	MA 3	A
3	KA. BAPPEDA	E
4	KABID. Hukum	
5	KABID. PPM	

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal 28 NOVEMBER 2024



Diundangkan di Unaaha
pada tanggal 28 NOVEMBER 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,

FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025 NOMOR 718

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan sampai sekarang menjadi persoalan yang tidak pernah hilang di dunia. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yakni sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang layak dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum tersebut antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Dalam SDGs (*sustainable development goals*) dinyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai prioritas pertama. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya yaitu dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau dan seterusnya hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Peraturan Presiden tersebut juga memuat strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan secara nasional. Secara nasional strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :

PARAF KOORDINASI

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
- b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
- c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil
- d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Untuk memastikan strategi nasional percepatan penanggulangan kemiskinan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dituntut untuk memperbaharui dan menyesuaikan strategi penanggulangan kemiskinan yang ditempuh dengan perkembangan aktual baik secara eksternal maupun internal yang terjadi. Upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berkorelasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Tahun 2025-2045, pada misi pertama RPJPD yakni : "Mewujudkan Kualitas sumber daya manusia yang unggul". Misi tersebut dijabarkan kedalam Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 berupa "meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi lokal dan inovasi teknologi" dengan sasaran meningkatnya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal yang inklusif dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Selama ini upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai program pembangunan, baik nasional, regional, maupun daerah. Namun ketepatan program dan sasaran masih belum optimal. Berdasarkan data BPS, kemiskinan Kabupaten Konawe sebesar 13,25% ditahun 2024. Angka tersebut menunjukkan Kabupaten Konawe berada pada Zona Merah, yaitu berada diatas Rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara (11,21%) dan diatas rata-rata Nasional (9,03%). Persentase penduduk miskin Kabupaten Konawe menempati posisi ke-11 dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara 2024



Sumber :BPS Tahun 2024, Data di Olah

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe pada periode Tahun 2020 masih dapat tumbuh positif ditengah Pandemi Covid-19 yakni sebesar 6,89%, kemudian ditahun 2021 sebesar 7,78%, ditahun 2022 naik sebesar 15,38%, dan ditahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 22,52%. Dimana dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Konawe menempati urutan pertama dari laju pertumbuhan kabupaten/kota lainnya dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Namun Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi tersebut, tidak berbanding lurus dengan Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Konawe. Fenomena ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tidak berpihak pada penduduk miskin. Tercatat pada Tahun 2020 sampai Tahun 2021, Jumlah Penduduk Miskin mengalami peningkatan dari 31,63 ribu jiwa atau 12,20% menjadi 32,46 ribu atau 13,03%. Pemerintah Kabupaten Konawe terus berupaya menekan angka kemiskinan, hasilnya pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 32,09 ribu jiwa atau 12,75%, namun kembali naik pada periode tahun 2023 sampai tahun 2024. Tercatat jumlah penduduk miskin meningkat mencapai 33,09 ribu jiwa atau 13,02% dari jumlah penduduk. Dan di Tahun 2024 Penduduk Miskin mencapai 33,99 ribu atau 13,25 persen.

PARAF KOORDINASI

Tabel 1. 1 Perkembangan Penduduk Miskin
Kabupaten Konawe 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2020	31,63	12,20
2021	32,46	13,03
2022	32,09	12,75
2023	33,09	13,02
2024	33,99	13,25

Sumber :BPS Tahun 2024, Data di Olah

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang secepatnya harus segera diatasi. Oleh karena itu diperlukan upaya yang terencana, sistematis dan terkoordinasi yakni dengan menyusun panduan yang dapat dijadikan rujukan bersama, yaitu berupa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). RPKD diperlukan karena kompleksnya masalah kemiskinan tidak hanya dari segi rendahnya pendidikan dan pendapatan namun juga terletak dari masalah makro seperti karakteristik wilayah dan mikro yakni terkait dengan rumah tangga di daerah itu sendiri.

RPKD Kabupaten Konawe Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2025 – 2029. Selanjutnya RPKD akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan dukungan dari para pemangku kepentingan baik dari kalangan swasta maupun masyarakat. Dalam kaitan itu diperlukan koordinasi agar setiap program dan kegiatan tepat sasaran, efektif, dan efisien. Target capaian penangglangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh komitmen dengan menempatkan kemiskinan sebagai agenda utama dalam kebijakan.

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 adalah sebagai landasan kebijakan daerah dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam mensinergikan upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, serta tolak ukur dalam menetapkan rencana aksi penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

PARAF KOORDINASI

2. Manfaat

Manfaat Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 adalah Terbentuknya komitmen pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Konawe

C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Konawe Tahun 2025 – 2029 meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
- 8) Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

PARAF KOORDINASI

- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
- 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 16) Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan;
- 17) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 274);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025 Nomor : 277).



D. Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN, berisikan tentang Latar Belakang, Tujuan, Manfaat, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan.
BAB II	KONDISI UMUM KABUPATEN KONAWE, Menguraikan mengenai Gambaran Umum dan Kondisi Kabupaten Konawe dari aspek kewilayahan, kependudukan dan perekonomian.
BAB III	PROFIL KEMISKINAN DAERAH, berisikan tentang Data-data Kemiskinan di Kabupaten Konawe.
BAB IV	PRIORITAS PROGRAM, berisikan tentang Isu Strategis, Rencana dan Program terhadap Upaya Penanggulangan Kemiskinan.
BAB V	LOKASI PRIORITAS, berisikan tentang Rencana Lokasi Prioritas selama 5 (lima) tahun yang akan dilaksanakan dalam RPKD di Kabupaten Konawe
BAB VI	PENUTUP, berisikan tentang Penutup dari Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029

PARAF KOORDINASI

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Geografis

1. Kondisi Geografis dan Administrasi Daerah

Kabupaten Konawe merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Ibu Kota Kabupaten di Kota Unaaha, secara geografis terletak di bagian selatan Khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 02°45' dan 04°15' Lintang Selatan, membujur dari Barat ke Timur antara 121°15' dan 123°30' Bujur Timur. Secara Administratif Kabupaten Konawe terbagi menjadi 28 Kecamatan yang meliputi 291 Desa, 57 Kelurahan. Luas Wilayah 5.087,68 km². Kabupaten Konawe merupakan imperium berkembangnya kebudayaan Tolaki, letaknya yang berada tepat ditengah wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara menempatkan wilayah ini sebagai penghubung antar wilayah daratan di Sulawesi Tenggara. Secara Rinci nama Kecamatan dan luas wilayahnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Presentase menurut
Kecamatan Kabupaten Konawe**

Kecamatan	Ibu kota Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
1	2	3	4
Soropia	Toronipa	55,55	0,91
Lalonggasumeeto	Nii Tanasa	34,18	0,56
Sampara	Sampara	46,62	0,76
Bondoala	Laosu	32,86	0,54
Besulutu	Besulutu	108,18	1,77
Kapoiala	Kapoiala	35,78	0,58
Anggalomoare	Tabanggele	19,32	0,32
Morosi	Besu	135,91	2,22
Lambuya	Lambuya	96,22	1,57
Uepai	Uepai	160,73	2,63
Puriala	Watundehoa	157,40	2,57
Onembute	Onembute	135,33	2,21
Pondidaha	Pondidaha	66,07	1,08
Wonggeduku	Puuduria	73,69	1,20
Amonggedo	Amonggedo Baru	177,80	2,91

PARAF KOORDINASI

Kecamatan	Ibu kota Kecamatan	Luas (km2)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
1	2	3	4
Wonggeduku Barat	Puday	37,83	0,62
Wawotobi	Wawotobi	134,06	2,19
Meluhu	Meluhu	110,47	1,81
Konawe	Tawanga	18,37	0,30
Unaaha	Puunaha	29,87	0,49
Anggaberri	Andabia	123,12	2,01
Abuki	Abuki	185,61	3,03
Latoma	Waworaha	1.316,25	21,51
Tongauna	Tongauna	47,72	0,78
Asinua	Ambondia	322,24	5,27
Padangguni	Padangguni	210,15	3,43
Tongauna Utara	Puundombi	157,34	2,57
Routa	Routa	2.090,04	34,16
Konawe	Unaaha	6.118,72	100.00

Sumber : Kabupaten Konawe Dalam Angka Tahun 2025

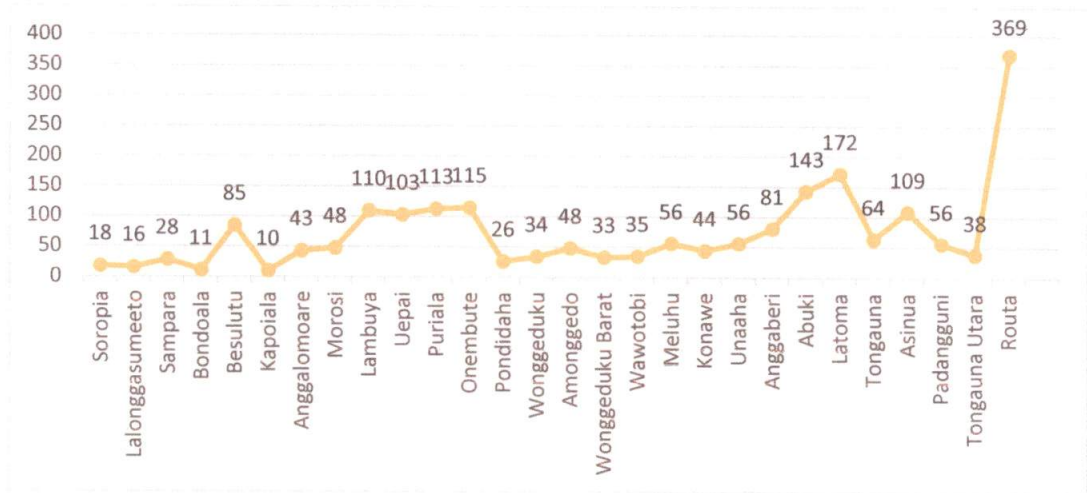
Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Konawe sebagai berikut :

- Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Konawe Utara di bagian Utara
- Laut Banda, Laut Maluku, dan Kota Kendari di bagian Timur
- Kabupaten Konawe Selatan di bagian Selatan
- Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Kolaka di Bagian Barat

Untuk lebih jelasnya batas administrasi Kabupaten Konawe dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2. 2 Kondisi Topografi Kabupaten Konawe



Kabupaten Konawe mempunyai beberapa sungai besar yang sangat potensial untuk pengembangan pertanian, irigasi dan pembangkit tenaga listrik seperti Sungai Konawehea dan Sungai Lahumbuti. Kedua sungai ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Konawe sebagai sumber irigasi sawah dimana untuk Sungai Konawehea yang memiliki debit air cukup besar yakni $\pm 200 \text{ M}^3/\text{detik}$ telah dibangun Bendung Wawotobi yang mampu mengairi sawah seluas ± 18.000 Hektar dan Sungai Lahumbuti telah dibangun Bendung Walay. Selain itu terdapat pula Rawa Aopa yang potensial untuk pengembangan usaha perikanan darat.

Disamping sungai-sungai besar terdapat potensi sungai-sungai kecil lainnya yang saat ini juga sudah dimanfaatkan untuk pengairan sawah. Dibawah ini merupakan wilayah-wilayah kecamatan yang memanfaatkan potensi hidrologi berdasarkan pembagian luas lahan sawah fungsional yang berasal dari irigasi dan non irigasi.

PARAF KOORDINASI

Tabel 2. 2 Potensi Irigasi

No .	Kecamatan	Irigasi (Hektar/Ha)	Non Irigasi (Hektar/Ha)	Jumlah (Hektar/Ha)
1	2	3	4	5
1	Soropia	-	-	-
2	Lalonggasumeeto	-	-	-
3	Sampara	-	-	-
4	Bondoala	280	2.749	3.356
5	Besulutu	-	55	55
6	Kapoiala	45	419	516
7	Anggalomoare	250	-	30
8	Morosi	518	-	-
9	Lambuya	1.962	513	3.000
10	Uepai	1.865	-	2.639
11	Puriala	344	-	2.394
12	Onembute	1.174	68	1.251
13	Pondidaha	2.867,61	-	2.048
14	Wonggeduku	3.391,28	-	3.153
15	Amonggedo	2.984,94	-	2.637
16	Wonggeduku Barat	2.945,40	-	2.521
17	Wawotobi	2.692,84	-	2.270
18	Meluhu	1.391	-	1.320
19	Konawe	846	-	361
20	Unaaha	1.175,40	-	766
21	Anggaberi	963,50	35	1.090
22	Abuki	2.035,61	377	2.1
23	Latoma	351	-	102
24	Tongauna	1.746,42	-	5.305
25	Asinua	931	335	1.016
26	Padangguni	2.597,84	69	2.294
27	Tongauna Utara	4.061	-	-
28	Routa	283	-	182
29	Anggoota	1.085,55		
	Jumlah/ Total	38.787,39 Ha	4.620 Ha	40.505 Ha

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman

PARAF KOORDINASI

Penggunaan lahan di Kabupaten Konawe diperuntukan untuk lahan sawah, lahan bangunan dan halaman sekitarnya, tegal/kebun/ladang/huma, padang rumput, tambak/kolam/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan rakyat, hutan negara, perkebunan, lahan yang sementara tidak diusahakan dan lain sebagainya.

Tabel 2. 3 Penggunaan Lahan Kabupaten Konawe

No.	Penggunaan lahan	2022	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Badan Air	1.328,23	0,25
2.	Belukar	56.332,48	10,68
3.	Belukar rawa	14.833,17	2,81
4.	Hutan lahan kering primer	330.930,92	62,74
5.	Hutan lahan kering sekunder	18.914,48	3,59
6.	Permukiman	4.678,32	0,89
7.	Perkebunan	2.975,10	0,56
8.	Pertanian lahan kering	12.218,93	2,32
9.	Pertanian lahan kering campur	36.496,42	6,92
10.	Rawa	354,32	0,07
11.	Savanna	7.142,75	1,35
12.	Sawah	31.828,14	6,03
13.	Tambak	3.824,26	0,73
14.	Tanah terbuka	5.152,04	0,93
15.	Hutan mangrove sekunder	375,40	0,07
16.	Hutan rawa primer	47,17	0,01
17.	Hutan rawa sekunder	20,83	0,00
Jumlah		527.453,97	100

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe, 2023

3. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034, maka kebijakan utama pembentukan struktur tata ruang di Kabupaten Konawe diwujudkan berdasarkan :

- a. Arahkan pengembangan pusat-pusat kegiatan meliputi Pusat Kegiatan Wilayah terdapat di Unaaha. Pusat Pelayanan Kawasan terdapat di kawasan perkotaan Wawotobi, kawasan perkotaan Pondidaha, kawasan perkotaan Sampara dan kawasan perkotaan Onembute. Pusat Pelayanan Lingkungan terdapat antara lain di Toronipa, Nii Tanasa, Laosu, Watundehoa, Kapoiala, Amonggedo

PARAF KOORDINASI

- Baru, Besulutu, Lambuya, Uepai, Puuduria, Meluhu, Tawanga, Anabia, Abuki, Waworaha, Tongauna. Ambodia dan Routa.
- b. Sistem jaringan prasarana utama terdiri dari sistem jaringan transportasi darat (kawasan yang ditetapkan menjadi bagian dari Ibukota Kabupaten serta kawasan sekitarnya dalam jangkauan Pusat Pelayanan kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan) jalan arteri yang menghubungkan Kota Kendari, Kabupaten Kolaka Timur. Jalan Kolektor primer yang menghubungkan Kabupaten Konawe Utara. Rencana jaringan jalan berupa pembukaan jalan Kabupaten yakni ruas jalan poros Wawolatoma – Routa. Jaringan angkutan sungai yang menghubungkan antara pelabuhan grandis dengan pelabuhan asinua tua. Serta rencana jalur kereta api angkutan barang dengan perlintasan Kota Kendari-Unaaha-Kabupaten Kolaka. Sistem jaringan transportasi laut yang meliputi pelabuhan pelayaran rakyat eksisting yang terdiri atas Dermaga Toronipa dan Dermaga Pulau Saponda Laut.

Tabel 2. 4 Rencana Pengembangan Wilayah Kawasan Budidaya

Rencana		Uraian
No.	Pengembangan Kawasan	
1	2	
1	Kawasan peruntukan hutan Produksi dan hutan rakyat	Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) ditetapkan seluas 91.355,08 hektar, yang tersebar di Kecamatan Abuki, Routa, Latoma, Lambuya, Unaaha, Wawotobi, dan Pondidaha.
		Kawasan hutan Produksi (HP) ditetapkan seluas 51.188,84 hektar, yang tersebar di Kacamatan Abuki, Routa, Latoma, Lambuya, Unaaha, Wawotobi, Pondidaha dan Sampara.
		Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) ditetapkan seluas 3.787,79 hektar, yang tersebar di Kecamatan Abuki, Latoma, dan Lambuya.
		Kawasan hutan rakyat direncanakan di Kecamatan Pondidaha, Latoma, Abuki dan Lambuya
2		Kawasan Peruntukan tanaman pangan dengan komoditi padi sawah, padi ladang,

PARAF KOORDINASI

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
1	2	3
	Kawasan peruntukan pertanian	dan palawija terdapat di Kecamatan Tongauna, Abuki, Wonggeduku, Amonggedo, Uepai, Wawotobi, Lambuya, Pondidaha, Meluhu, Bondoala, Onembute, Puriala, Asinua, Unaaha, Anggaberri, Konawe, Latoma, Kapoiala, Routa, Sampara. Kawasan peruntukan holtikultura dengan komoditi meliputi tanaman buah-buahan, sayuran, florikultura dan tanaman obat terdapat di Kecamatan Anggaberri, Uepai, dan Abuki. Kawasan peruntukan perkebunan dengan komoditi meliputi kakao, jambu mete, lada, kopi, kelapa, kelapa sawit, cengkeh, dan sagu terdapat di Kecamatan Abuki, Latoma, Tonguna, Puriala, Wawotobi, Meluhu, Besulutu, dan Wonggeduku. Kawasan peruntukan peternakan meliputi : - Ternak skala besar berlokasi pada Kecamatan Uepai, Puriala, Amonggedo, Wawotobi, Abuki, Wonggeduku, Latoma, Tongauna dan Unaaha. - Ternak skala kecil berlokasi pada Kecamatan Lambuya, Uepai, Onembute, Pondidaha, Wonggeduku, Amonggedo, Abuki dan Tongauna.
3	Kawasan peruntukan Perikanan	Kawasan Peruntukan perikanan tangkap meliputi: - Kawasan peruntukan dengan kewenangan pengelolaan wilayah laut kabupaten dari 0-4 mil laut terdapat pada perairan laut di Kecamatan Soropia dan Lalonggasumeeto - Sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa pangkalan pendaratan

PARAF KOORDINASI

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
1	2	3
		ikan (PPI) di Kecamatan Lalonggasumeeto dan Kapoiala Kawasan peruntukan budidaya perikanan meliputi: a. Budidaya perikanan air tawar di Kecamatan Lambuya, Uepai, Puriala, Pondidaha, Wonggeduku, Amonggedo, Wawotobi, Meluhu, Konawe, Unaaha, Anggaberu, Abuki, Tongauna, Sampara, Onembute, Besulutu, dan Latoma b. Budidaya perikanan air payau di Kecamatan Soropia, Bondoala, dan Kapoiala c. Budidaya perikanan laut dengan komoditi ikan dan rumput laut di Kecamatan Lalonggasumeeto dan Soropia Kawasan Pengolahan Perikanan dan minapolitan di Kecamatan Lalonggasumeeto dan Soropia Kawasan Pulau-pulau kecil meliputi : a. Pulau berpenghuni yaitu Pulau Saponda Laut di Kecamatan Soropia b. Pulau tidak berpenghuni yaitu Pulau Bokori, Pulau Dangedangea, dan Pulau Saponda Laut.
4	Kawasan Peruntukan Pertambangan	Wilayah Usaha Pertambangan meliputi : a. Mineral logam yaitu Nikel Laterit, besi, kromit, kobalt, dan emas terdapat di Kecamatan Routa, Puriala, Pondidaha, Amonggedo, Besulutu dan Latoma b. Mineral Bukan Logam terdapat di Kecamatan Meluhu, Pondidaha, Puriala, Latoma, Asinua, Routa, dan Sampara c. Mineral batuan terdapat di Kecamatan Latoma, Asinua, Routa, Pondidaha.

PARAF KOORDINASI

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
1	2	3
		Wilayah pertambangan rakyat dengan komoditas Pasir Batu dan Tanah Liat di Kecamatan Unaaha, Konawe, Sampara, Bondoala, Kapoiala, Uepai, Besulutu, Pondidaha, Puriala dan Onembute.
		Wilayah pencadangan negara dengan komoditas berupa nikel di Kecamatan Routa, Puriala, Pondidaha.
5	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan industri mikro, kecil dan menengah meliputi : a. Industri Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan komoditas kedelai di Kecamatan Unaaha, Lambuya, Uepai, Wawotobi dan Tongauna. Industri pengolahan sagu di Kecamatan Unaaha dan Sampara. Industri Pengolahan padi di Kecamatan Sampara, Amonggedo, Pondidaha, Wonggeduku, Meluhu, Anggaber, Unaaha, Konawe, Wawotobi, Lambuya, Abuki dan Asinua b. Industri pengolahan hasil perkebunan komoditas kakao yaitu pengeringan kakao di Kecamatan Unaaha dan Wawotobi. Penggilingan kopi dan kopi bubuk di Kecamatan Unaaha, Sampara dan Amonggedo. Pembuatan minyak kelapa di Kecamatan Tongauna, Kapoiala, Latoma, Wawotobi dan Lambuya. c. Industri Pengolahan hasil laut dan perikanan di Kecamatan Kapoiala, Lalonggasumeto, Soropia dan Sampara d. Industri pemanfaatan hasil kehutanan yang terdiri dari Industri penggergajian kayu dan kayu olahan, industri mebel kayu, industri pengawetan dan

PARAF KOORDINASI

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
1	2	3
		pengolahan rotan yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Konawe. e. Industri Pengolahan hasil pertambangan yakni pengolahan batu pecah (split), pengolahan/pengambilan pasir dan kerikil, pengolahan tanah liat di Kecamatan Pondidaha, Onembute dan Besulutu dan pengolahan batu kapur. f. Industri pengolahan hasil peternakan terdiri atas industri penggilingan daging, ternak unggas dan ternak sapi potong. a. Kawasan peruntukan industri besar meliputi industri rotan dan kayu di Kecamatan Anggaberu. b. Rencana kawasan Industri meliputi Kecamatan Puriala, Pondidaha, Bondoala, Kapoiala, Amonggedo.
6	Kawasan Peruntukan Pariwisata	a. Kawasan Peruntukan pariwisata alam laut/bahari meliputi Pantai Bokori, Pantai Toronipa, gugusan pulau-pulau di Kecamatan Soropia, Pantai Batu Gong, dan Taman wisata perairan pada Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD). b. Kawasan peruntukan pariwisata alam pegunungan/hutan meliputi Air Terjun Larowiu, Air terjun Anawai, Air terjun Kumapodahu dan Air Terjun Rukuo. c. Kawasan peruntukan pariwisata sejarah dan budaya meliputi benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya, pesta adat, pesta panen, atraksi tarian, musik tradisional, tarian dan upacara adat.

PARAF KOORDINASI

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
1	2	3
		d. Kawasan wisata buatan meliputi kolam Air Panas Sonai, Lapangan MTQ dan taman kota dan alun-alun di Kecamatan Unaaha.
7	Kawasan Peruntukan permukiman	a. Kawasan Permukiman perkotaan yaitu meliputi kawasan perkotaan Unaaha dan setiap ibukota kecamatan b. Kawasan permukiman perdesaan yaitu meliputi kawasan perdesaan di setiap kecamatan. c. Kawasan permukiman transmigrasi yang terdapat di Kecamatan Pondidaha, Wawotobi, Wonggeduku, Muluhu, Unaaha, Lambuya, Uepai, Puriala, Onembute, Amonggedo, Tongauna, dan Abuki. d. Rencana permukiman transmigrasi di Kecamatan Asinua, Routa, Loma dan Amonggedo. Permukiman pantai yang terdapat di Kecamatan Kapoiala, Soropia, Bondola dan Lalonggasumeeto.

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034

B. Demografis
1. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Konawe pada periode semester 2 tahun 2024 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe berjumlah 269.128 (dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan) jiwa. Dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2020 tercatat berjumlah 259.946 (dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam) jiwa yang artinya terdapat penambahan jumlah penduduk sebanyak 9.182 (sembilan ribu seratus delapan puluh dua) jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 2% (dua persen). Perkembangan penduduk

PARAF KOORDINASI

Kabupaten Konawe selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Kabupaten Konawe Menurut Kecamatan Tahun 2019-2024

No.	Kecamatan	Persentase Pertumbuhan Penduduk				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Soropia	9.427	9.414	9328	9328	9490
2	Lalonggasumeeto	5.409	5.497	5809	5935	5946
3	Sampara	9.361	9.469	9603	9702	9832
4	Bondoala	5.480	5.631	5766	6026	6153
5	Besulutu	8.724	8.669	8633	8783	8957
6	Kapoiالا	6.339	6.834	7157	7290	7342
7	Anggalomoare	5.005	5.034	5283	5348	5446
8	Morosi	6.567	6.983	7531	7919	8047
9	Lambuya	7.834	7.791	7746	7834	8008
10	Uepai	14.694	14.600	14370	14648	14943
11	Puriala	9.423	9.434	9457	9659	9849
12	Onembute	7.316	7.436	7548	7650	7721
13	Pondidaha	13.238	13.136	13224	13385	13718
14	Wonggeduku	14.154	14.069	13875	14093	14316
15	Amonggedo	10.989	10.990	11063	11348	11461
16	Wonggeduku Barat	9.102	9.092	9254	9319	9493
17	Wawotobi	23.350	23.073	22577	22706	22974
18	Meluhu	5.606	5.687	5757	5827	5926
19	Konawe	9.651	9.855	9961	10022	10195
20	Unaaha	25.669	25.091	24457	24520	24933
21	Anggaberu	7.140	7.121	6963	7059	7198
22	Abuki	8.621	8.491	8379	8510	8737
23	Latoma	3.072	2.965	3182	3199	3145
24	Tongauna	18.218	18.167	11194	11194	11444
25	Asinua	3.059	3.087	3145	3078	3151
26	Padangguni	9.034	8.832	8601	8698	8797
27	Tongauna Utara	...	...	...	7150	7279
28	Routa	3.464	3.792	4118	4371	4627
29	Anggotoa	...	...	...	...	...
		259.946	260.240	253.981	264.601	269.128

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, 2024

PARAF KOORDINASI

Kecamatan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk terbesar adalah Kecamatan Amonggedo yang merupakan Kawasan peruntukan transmigrasi. Sedangkan kecamatan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk terkecil adalah Kecamatan Tongauna. Persentase pertumbuhan penduduk tiap Kecamatan di Kabupaten Konawe Tahun 2019-2024 sebagaimana terlihat dalam tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Kabupaten Konawe Menurut Kecamatan Tahun 2019-2024

No.	Kecamatan	Persentase Pertumbuhan Penduduk					Rata-Rata
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Soropia	1,63	1,63	1,63	-0,92	0,47	0,89
2	Lalonggasumeeto	1,67	1,67	1,67	6,23	1,64	2,58
3	Sampara	1,71	1,71	1,82	2,35	0,69	1,66
4	Bondoala	2,19	2,19	3,71	4,49	3,60	3,24
5	Besulutu	2,58	2,58	2,58	0,53	1,81	2,02
6	Kapoiala	4,67	4,67	4,67	5,11	2,39	4,30
7	Anggalomoare	2,03	2,03	1,82	5,30	1,47	2,53
8	Morosi	5,10	5,10	3,71	10,09	3,31	5,46
9	Lambuaya	1,42	1,42	1,42	-0,06	1,43	1,13
10	Uepai	1,95	1,95	1,95	-0,61	2,23	1,49
11	Puriala	2,24	2,24	2,24	1,27	1,83	1,96
12	Onembuta	1,96	1,96	1,96	1,64	1,16	1,74
13	Pondidaha	2,14	2,14	2,14	0,97	2,43	1,96
14	Wonggeduku	1,55	1,55	1,43	-0,79	1,80	1,11
15	Amonggedo	1,56	1,56	1,56	90,15	2,33	19,43
16	Wonggeduku Barat	1,24	1,24	1,43	2,19	1,43	1,51
17	Wawotobi	0,61	0,61	1,18	-2,06	1,02	0,27
18	Meluha	0,96	0,96	0,96	1,42	2,05	1,27
19	Konawe	1,52	1,52	1,52	1,38	1,95	1,58
20	Unaaha	1,39	1,39	1,39	-2,67	1,38	0,58
21	Anggaberu	1,52	1,52	1,52	-2,24	2,34	0,93
22	Abuki	2,19	2,19	1,80	-0,82	2,53	1,58
23	Latoma	1,81	1,81	1,81	6,79	-0,09	2,43
24	Tongauna	1,28	1,28	1,43	-62,19	1,27	-11,39
25	Asinua	1,68	1,68	1,68	0,71	1,13	1,38

PARAF KOORDINASI

No.	Kecamatan	Persentase Pertumbuhan Penduduk					Rata-Rata
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Padangguni	1,45	1,45	1,80	-2,09	0,99	0,72
27	Tongauna Utara	1,66	1,66	1,43	...	2,57	1,83
28	Routa	6,20	6,20	6,20	9,65	6,05	6,86
29	Anggotoa	2,90	2,90	1,18	...	...	2,33
	Rata-rata Kabupaten	1,83	1,83	1,83	4,61	1,79	2,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, Data di Olah

2. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Pada kondisi tahun 2024, lapangan pekerjaan utama penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja adalah berjumlah 133.504 (seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat) jiwa dengan rincian bekerja di sektor jasa sebesar 65.032 (enam puluh lima ribu tiga puluh dua) jiwa, sektor pertanian sebesar 36.774 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) jiwa, dan sektor manufaktur sebesar 31.698 (tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh delapan) jiwa. Sedangkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum/tidak bekerja sebanyak 68.713 (enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas) jiwa.

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Konawe, Tahun 2024

Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Penduduk Bekerja	86.565	46.939	133.504
Penduduk Belum / Tidak Bekerja	18.205	50.508	68.713
Pertanian	28.066	8.708	36.774
Manufaktur	25.290	6.408	31.698
Jasa	33.209	31.823	65.032
Jumlah	191.335	144.386	335.721

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, 2024

Mata pencaharian utama penduduk pada tahun 2024 didominasi dari sektor penduduk yang bekerja di bidang jasa, kemudian disusul lapangan pekerjaan utama adalah sektor pertanian, sektor ketiga yang menjadi lapangan pekerjaan utama adalah sektor manufaktur. Untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja di

PARAF KOORDINASI

suatu daerah, ukuran umum yang dipakai adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu suatu ukuran yang menggambarkan proporsi penduduk angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas pada Tabel 2.8

Tabel 2. 8 TPAK, TPT, dan TKK di Kabupaten Konawe Tahun 2023 dan 2024

No.	Indikator	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	TPAK	84,91	84,67	49,62	50,13	67,93	68,03
2	TPT	2,48	2,42	4,20	3,91	3,09	2,95

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, 2023

TPAK Kabupaten Konawe menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2023/2024 sebesar 68,03 % (enam puluh delapan koma nol tiga persen), artinya setiap seratus orang penduduk usia kerja yang berdomisili di Kabupaten Konawe sekitar 68 (enam puluh delapan) orang memasuki pasar kerja (tergolong dalam angkatan kerja, baik sudah bekerja ataupun masih pengangguran). Bila diamati jenis kelamin TPAK laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. TPAK laki-laki sebesar 84,67 % (delapan puluh empat koma enam puluh tujuh persen), sedangkan TPAK perempuan 50, 13 % (lima puluh koma tiga belas persen).

3. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Data pada tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Konawe semakin meningkat pada tingkat yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Konawe semakin baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2. 9 Penduduk Usia 7 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Konawe Tahun 2022-2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		2023	2024
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	67.196	70.372
2	Tidak Punya Ijazah SD	26.808	26.695
3	SD/MI/Sederajat	48.241	47.976
4	SMP/MTs/Sederajat	40.882	41.126

PARAF KOORDINASI

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		2023	2024
5	SMA/MA/Sederajat	62.805	63.671
6	Program DI/DII	1.354	1.316
7	Program DIII/Sarjana Muda	3.059	3.116
8	Program DIV/S1	13.277	13.852
9	S2	956	976
10	S3	23	28

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab . Konawe, 2024

C.Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi atau economic growth, merupakan proses kenaikan output per kapita yang dimiliki suatu daerah dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi suatu daerah yang terjadi dalam periode tertentu atau akumulasi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi didefinisaikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju lebih baik pada periode tertentu.

Selama kurun waktu tahun 2020-2024 perekonomian Kabupaten Konawe senantiasa mengalami dinamika, dimana pada tahun 2020 masih tumbuh positif ditangah pandemi Covid-19 yakni sebesar 6,89%, puncaknya ditahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 22,52%, kemudian turun hingga 11,82% ditahun 2024. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 10 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Konawe Tahun 2019-2023

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nasional	-2,03	3,71	5,35	5,06	5,04
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Prov. Sulawesi Tenggara	-0,65	4,1	5,53	5,35	5,40

PARAF KOORDINASI

Kab. Konawe	6,89	7,78	15,38	22,52	11,82
-------------	------	------	-------	-------	-------

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, 2025

Pertumbuhan ekonomi yang dialami Kabupaten Konawe pada tahun 2024 sebesar 11,82% merupakan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar. Pertumbuhan yang paling kecil dialami oleh Kabupaten Kolaka Timur yaitu sebesar 3,16%. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 11 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Kendari	-1,30	3,86	4,94	3,29	4,81
Kab. Konawe Utara	-0,72	4,59	5,07	5,03	5,74
Kab. Kolaka Timur	-0,31	4,83	4,47	2,03	3,16
Kab. Konawe Selatan	-2,22	4,76	5,85	5,19	5,63
Kab. Kolaka	-3,40	4,02	2,38	5,17	5,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, 2025

Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Konawe terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 10,29 point dimana pada tahun 2023 sebesar 4,23% dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024 menjadi 14,52%. Sedangkan Sektor Industri Pengolahan merupakan lapangan usaha dengan laju pertumbuhan terendah yaitu -38,61 point. Perbandingan laju pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Konawe antara tahun 2023 dan tahun 2024 dapat ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 12 Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Konawe Tahun 2023 dan Tahun 2024

Kategori	Lapangan Usaha	2023	2024	Selisih
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,43	6,42	4,99
B	Pertambangan dan Penggalian	0,02	-4,25	-4,27
C	Industri Pengolahan	58,18	19,57	-38,61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,87	1,72	-5,15



Kategori	Lapangan Usaha	2023	2024	Selisih
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,03	-1,05	-6,08
F	Konstruksi	1,12	5,78	4,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Scpcda Motor	7,64	6,86	-0,78
H	Transportasi dan Pergudangan	2,76	4,17	1,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,22	0,60	-3,62
J	Informasi dan Komunikasi	2,23	8,30	6,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,54	2,23	-4,31
L	Real Estat	0,27	1,45	1,18
M,N	Jasa Perusahaan	2,27	-0,23	-2,5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,23	14,52	10,29
P	Jasa Pendidikan	2,58	3,21	0,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,04	3,04	3
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,52	3,00	-0,52
PDRB		22,52	11,82	-10,7

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, data diolah

2. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Konawe didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi;

PARAF KOORDINASI

Pertambangan dan Penggalian ; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi masing-masing lapangan usaha dalam PDRB Kabupaten Konawe. Pada tahun 2024 sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 10.813,43 milyar rupiah (41,65%), Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi sebesar 3.236,28 milyar rupiah (18,77%), sektor konstruksi sebesar 1.473,42 milyar rupiah (8,88%), sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 1.241,44 milyar rupiah (7,78%) serta sektor Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1.400,70 milyar rupiah (7,77%). Untuk selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 13 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Konawe Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.560,61	2.652,33	2.748,79	2.923,24	3.236,28
B	Pertambangan dan Penggalian	1.029,87	1.062,62	1.210,82	1.309,90	1.241,44
C	Industri Pengolahan	2.543,15	3.372,38	5.594,95	9.003,52	10.813,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,27	3,50	4,02	4,47	4,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	8,53	8,43	8,28	8,79	8,96
F	Konstruksi	1.186,54	1.315,51	1.322,44	1.382,61	1.473,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	961,18	1.029,82	1.156,29	1.300,03	1.400,70

PARAF KOORDINASI

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
H	Transportasi dan Pergudangan	97,55	98,64	108,41	124,00	132,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	46,23	49,53	55,24	58,54	59,56
J	Informasi dan Komunikasi	72,20	74,00	73,74	74,38	79,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	158,60	171,42	188,13	204,70	208,92
L	Real Estat	182,32	183,81	195,03	199,60	202,92
M,N	Jasa Perusahaan	13,18	13,62	15,56	16,69	16,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	754,51	748,12	776,85	823,57	965,71
P	Jasa Pendidikan	504,20	510,30	554,02	594,61	624,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	140,04	148,90	153,17	155,89	164,55
R,S,T,U	Jasa Lainnya	98,48	101,18	103,81	110,86	114,50
PDRB		10.362,23	11.542,29	14.269,55	18.295,41	20.747,72

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, data diolah

Tabel 2. 14 Distribusi PDRB Kabupaten Konawe Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,71	22,98	19,26	15,98	15,60
B	Pertambangan dan Penggalian	9,94	9,21	8,49	7,16	5,98

PARAF KOORDINASI

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
C	Industri Pengolahan	24,54	29,22	39,21	49,21	52,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
F	Konstruksi	11,45	11,40	9,27	7,56	7,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,28	8,92	8,10	7,11	6,75
H	Transportasi dan Pergudangan	0,94	0,85	0,76	0,68	0,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,45	0,43	0,39	0,32	0,29
J	Informasi dan Komunikasi	0,71	0,63	0,52	0,41	0,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,53	1,49	1,32	1,12	1,01
L	Real Estat	1,76	1,59	1,37	1,09	0,98
M,N	Jasa Perusahaan	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,28	6,48	5,44	4,50	4,65
P	Jasa Pendidikan	4,87	4,42	3,88	3,25	3,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,35	1,29	1,07	0,85	0,79
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,95	0,88	0,73	0,61	0,55
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, data diolah

PARAF KOORDINASI

Seperti yang ditampilkan pada tabel 2.13, tahun 2020 agregasi ekonomi Kabupaten Konawe telah menembus level di atas 10,3 triliun rupiah dan tetap meningkat hingga tahun 2024 mencapai 20,7 triliun rupiah.

Penghitungan PDRB selain menggunakan pendekatan produksi, masih ada 2 pendekatan yang lain yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Walaupun berbeda pendekatan tapi hasilnya tetap sama. Namun yang biasa disediakan oleh BPS adalah pendekatan produksi dan pendapatan. PDRB menurut lapangan usaha merupakan hasil dari penghitungan pendekatan produksi. PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah semua jumlah produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor netto (ekspor dikurangi impor). PDRB menurut pendekatan pengeluaran juga penghitungannya dibagi 2 yaitu atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Berdasarkan PDRB dengan pendekatan pengeluaran dapat diketahui bahwa penggerak utama perekonomian Kabupaten Konawe adalah Konsumsi Rumah Tangga. Kontribusi jenis pengeluaran ini pada tahun 2024 sebesar 7.491,3 milyar rupiah (36,11%). Kontribusi pengeluaran Konsumsi Pemerintah berkontribusi sebesar 1.767,4 milyar rupiah (8,52%). Nilai Ekspor Kabupaten Konawe pada tahun 2024 mencapai 7.245,5 milyar rupiah (34,92%). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 15 PDRB Kabupaten Konawe Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.630,54	5.831,57	6.264,43	6.910,57	7.491,3
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	111,07	114,17	125,73	142,22	163,7

PARAF KOORDINASI

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.412,49	1.393,30	1.410,95	1.525,34	1.767,4
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.051,66	3.328,97	3.526,72	3.746,83	3.961,2
Perubahan Inventori	1,54	1,74	3,08	161,94	118,7
Net Ekspor Barang dan Jasa	154,92	872,55	2.938,65	5.808,50	7.245,5
PDRB	10.362,23	11.542,29	14.269,55	18.295,41	20.747,7

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, data diolah

Tabel 2. 16 Distribusi PDRB Kabupaten Konawe Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (%)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	54,34	50,52	43,90	37,77	36,11
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,07	0,99	0,88	0,78	0,79
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,63	12,07	9,89	8,34	8,52
Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,45	28,84	24,71	20,48	19,09
Perubahan Inventori	0,01	0,02	0,02	0,89	0,57
Net Ekspor Barang dan Jasa	1,50	7,56	20,59	31,75	34,92
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, data diolah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan Ekonomi

PARAF KOORDINASI

Kabupaten Konawe dari Tahun 2020 hingga 2024 berhasil mencatat konsistensi pertumbuhan. Kondisi pandemi Covid-19 ditahun 2020 dan pemulihan ekonomi ditahun 2021 dapat mempengaruhi beberapa komponen pengeluaran kecuali Komponen Pengeluaran Rumah Tangga dan Net Ekspor Barang dan jasa, namun tidak mempengaruhi Konsistensi pertumbuhan keseluruhan PDB adhb pengeluaran sejak tahun 2020. Nilai PDRB adhb Kabupaten Konawe Tahun 2024 mencapai 20,74 triliun rupiah. Secara nominal, mengalami kenaikan sebesar 2 triliun rupiah dibandingkan dengan Tahun 2023. Yang hanya mencapai 18,29 triliun rupiah. Naiknya PDRB adhb ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di hampir semua lapangan usaha.

b. PDRB per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan gambaran kemakmuran penduduk suatu daerah. Hal ini dikarenakan cara mengetahui PDRB Per Kapita adalah membagi PDRB daerah tersebut dengan jumlah penduduknya. Sedangkan sebagaimana diketahui bahwa PDRB adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan kegiatan ekonomi pada suatu wilayah pada suatu periode. Sama seperti PDRB sebagai dasar penghitungannya, PDRB Per Kapita juga terbagi menjadi 2 yaitu PDRB Per Kapita Atas Harga Berlaku dan PDRB Per Kapita Atas Harga Konstan. PDRB Per Kapita Atas Harga Berlaku menggambarkan kemampuan ekonomi penduduk pada saat ini, sedangkan PDRB Per Kapita Atas Harga Konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan kemampuan ekonomi penduduk tiap tahunnya karena menghilangkan faktor inflasi dalam penghitungannya.

PDRB Per Kapita Kabupaten Konawe cenderung meningkat tiap tahunnya. Pada Tahun 2024 sebesar 75,70 juta rupiah per kapita. Selain itu, pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Harga Konstan juga meningkat di Tahun 2024 yakni sebesar 45,88 juta rupiah per kapita. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Konawe dapat ditunjukkan pada tabel berikut.



Tabel 2. 17 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Konawe
Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	Jiwa	255.978	260.291	264.928	269.521	267.139
PDRB Atas Harga Berlaku	Milyar Rupiah	10.362,23	11.542,29	14.269,55	18.295,41	20.747,72
PDRB Per Kapita Atas Harga Berlaku	Juta Rupiah Per Kapita	40,48	44,34	53,86	67,88	75,70
PDRB Atas Harga Konstan	Milyar Rupiah	7.380,39	7.954,41	9.177,94	11,244,66	12.573,86
PDRB Per Kapita Atas Harga Konstan	Juta Rupiah Per Kapita	28,83	30,56	34,64	41,72	45,88
Pertumbuhan	Persen	6,89	7,78	15,38	22,52	11,82

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, data diolah

c. Inflasi

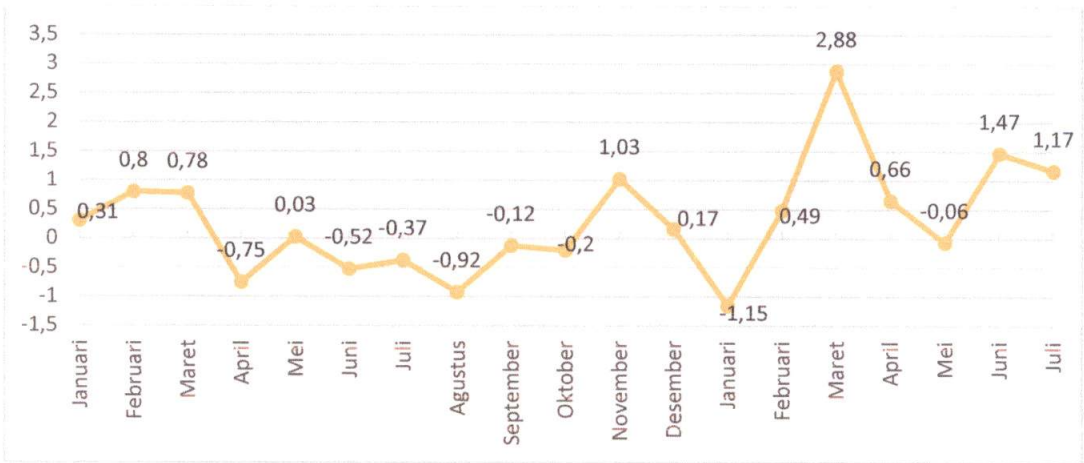
Inflasi merupakan angka yang menunjukkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja belum bisa disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Inflasi menjadi indikator penting untuk menilai stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat, sehingga pemantauan dan pengelolaannya menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Konawe selama periode tahun 2024 hingga awal 2025 menunjukkan tren fluktuasi. Inflasi tertinggi tercatat pada bulan Maret 2025

PARAF KOORDINASI

sebesar 2,88%, sementara deflasi terjadi pada bulan Januari 2025 sebesar -1,15%.

Tabel 2. 18 Perkembangan Inflasi Month To Month (m to m) Kabupaten Konawe Tahun 2024-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, data diolah

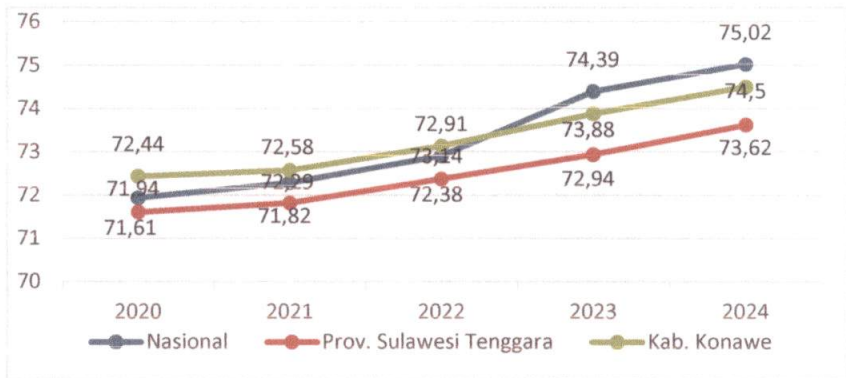
3. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Konawe ditunjukkan dengan upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini dikarenakan IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. Indeks ini dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu Kesehatan; Pengetahuan; dan Standar Layak Hidup. Dimensi Kesehatan diwakili oleh indikator Angka Harapan Hidup; dimensi Pengetahuan diukur menggunakan indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah; sedangkan dimensi Standar Layak Hidup diukur dengan Pengeluaran Per Kapita.

Capaian IPM Kabupaten Konawe rentang tahun 2020 hingga 2024 semakin meningkat. Capaian tahun 2024 sebesar 74,5 naik hingga 2,06 poin sejak tahun 2020 sebesar 72,44. Capaian IPM ditahun 2023 sebesar 74,5 menjadikan Kabupaten Konawe berada diatas Provinsi Sulawesi Tenggara dan dibawah Nasional. Perbandingan capaian IPM antara Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional dapat ditunjukkan pada grafik berikut.

PARAF KOORDINASI

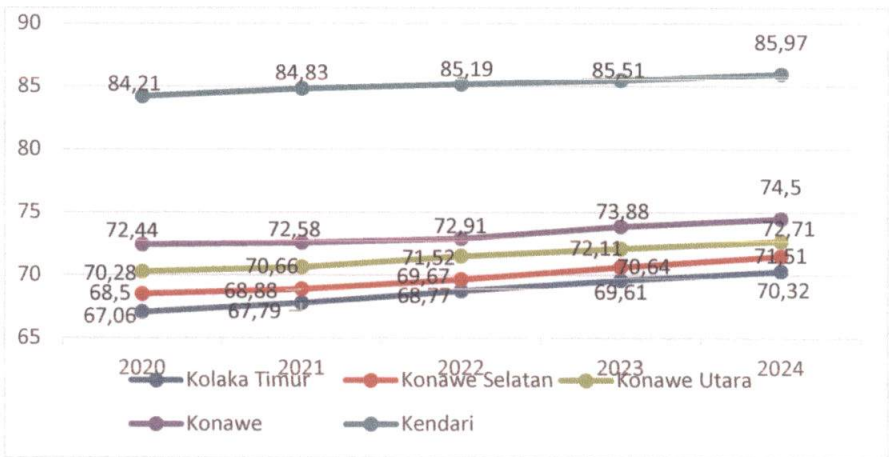
Gambar 2. 3 Perbandingan Capaian IPM Antara Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, data diolah

Adanya peningkatan nilai IPM tidak terlepas dari meningkatnya nilai dari dimensi Pembentuk IPM. Capaian pada grafik diatas menjadikan IPM Kabupaten Konawe termasuk kategori "tinggi". Selain itu, IPM Kabupaten Konawe pada tahun 2024 berada di bawah Kota Kendari atau urutan ke 2 jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 4 Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Konawe Dengan Kabupaten / Kota Sekitar Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, data diolah

Gambaran Indikator pembentuk IPM Kabupaten Konawe secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

PARAF KOORDINASI

a. Dimensi Kesehatan

Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi kesehatan adalah Umur Harapan Hidup (UHH). UHH saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Indikator ini sering digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam bidang kesehatan penduduk pada daerah tertentu. Semakin tinggi derajat kesehatan masyarakat, maka secara tak langsung dapat menaikkan umur harapan hidupnya.

Capaian umur harapan hidup penduduk di Kabupaten Konawe dalam kurun waktu 2020-2024 terus meningkat. Dari sebesar 72,44 tahun pada tahun 2020 meningkat menjadi 74,5 tahun pada tahun 2024. Capaian AHH Kabupaten Konawe berada diatas Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional. Perbandingan capaian tersebut dapat ditunjukkan melalui grafik berikut.

Gambar 2. 5 Perbandingan Capaian Angka Harapan Hidup Antara Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2020-2024

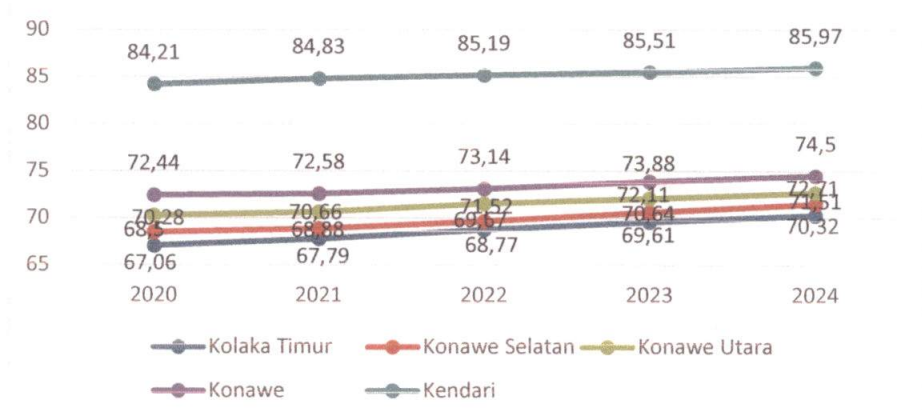


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, data diolah

Capaian AHH Kabupaten Konawe tahun 2024 sebesar 74,5 tahun berada diurutan ke 2 jika dibandingkan capaian kabupaten/kota sekitar. Capaian tertinggi diraih oleh Kota Kendari dengan 85,97 tahun dan yang paling rendah adalah Kabupaten Kolaka Timur yang mencapai 70,32 tahun. Perbandingan capaian AHH Kabupaten Konawe dan kabupaten / kota sekitarnya ditunjukkan grafik berikut.

PARAF KOORDINASI

Gambar 2. 6 Perbandingan Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Konawe dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, data diolah

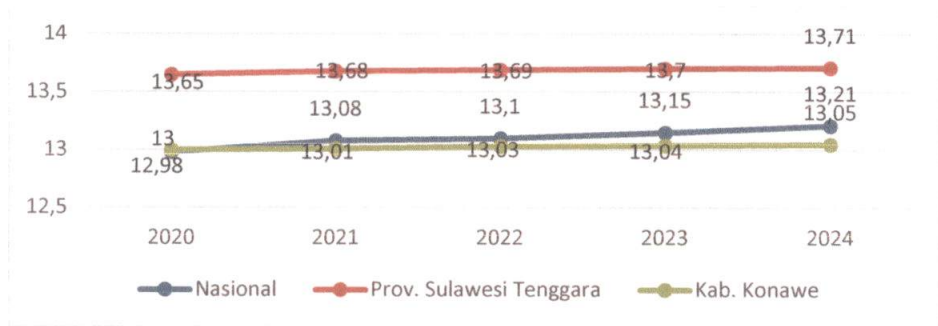
b. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Capaian harapan lama sekolah di Kabupaten Konawe dalam kurun waktu 2020 - 2023 semakin meningkat setiap tahunnya. Dari 13 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,05 tahun pada tahun 2024. Namun peningkatan yang diraih belum bisa membuat posisi Kabupaten Konawe diatas HLS Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional. Berikut grafik Perkembangan capaian HLS Kabupaten Konawe serta perbandingannya dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan nasional.

PARAF KOORDINASI

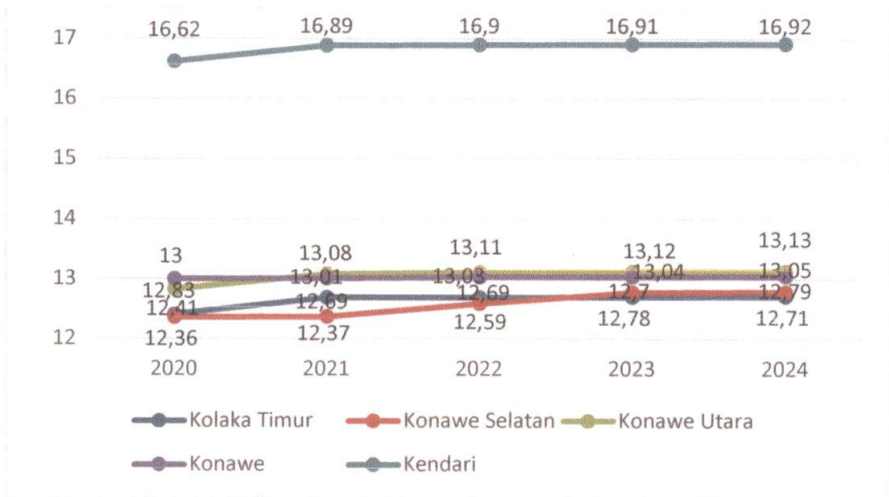
Gambar 2. 7 Perbandingan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah antara Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2020-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, data diolah

Capaian indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Konawe tahun 2024 berada di urutan ke 3 jika dibandingkan dengan capaian kabupaten / kota sekitar. Daerah sekitar yang memiliki capaian Harapan Lama Sekolah paling tinggi adalah Kota Kendari dengan capaian di tahun 2024 sebesar 16,92 tahun. Grafik berikut menampilkan perkembangan capaian HLS Kabupaten Konawe dan daerah sekitar dalam kurun waktu 2020-2023.

Gambar 2. 8 Perbandingan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Antara Kabupaten Konawe Dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024



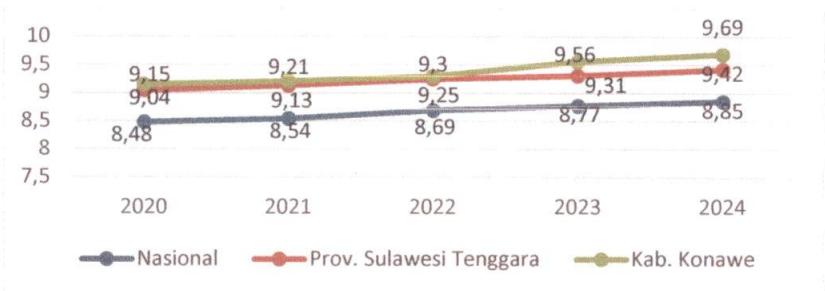
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, data diolah

PARAF KOORDINASI

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal.

Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Konawe menunjukkan kecenderungan meningkat. Dalam kurun waktu 2020 - 2024 capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari 9,15 tahun pada tahun 2020 menjadi 9,69 tahun pada tahun 2024. Capaian ini menjadikan Rata-Rata Lama Sekolah yang diraih Kabupaten Konawe berada diatas Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Perbandingannya dapat disimak melalui grafik berikut.

Gambar 2. 9 Perbandingan Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Antara Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2020-2024

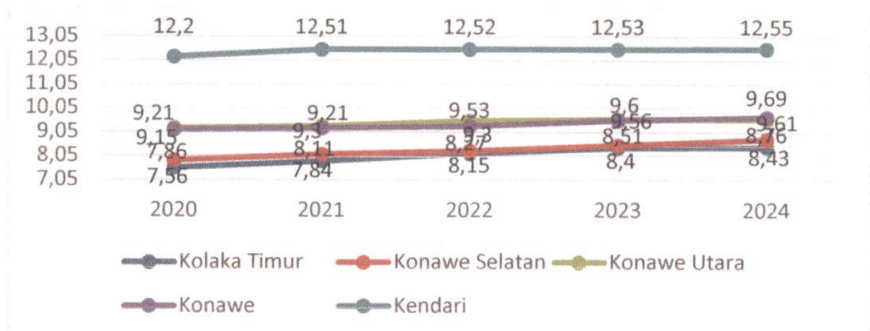


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, data diolah

Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Konawe berada diperingkat ke 2 diantara kabupaten / kota sekitar. Capaian tertinggi diraih oleh Kota Kendari dengan capaian di tahun 2024 sebesar 12,55 tahun dan capaian terendah adalah capaian Kabupaten Kolaka Timur yaitu sebesar 8,43 tahun. Perbandingan capaian RLS Kabupaten Konawe dan kabupaten / kota sekitar ditampilkan grafik berikut.

PARAF KOORDINASI

Gambar 2. 10 Perbandingan Capaian RLS Kabupaten Konawe Dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, data diolah

c. Dimensi Standar Layak Hidup

Dimensi Standar Layak Hidup IPM diukur oleh indikator Pengeluaran Per Kapita. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran per kapita Kabupaten Konawe selama tahun 2020 – 2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2020 sebesar Rp. 10.126.000 per kapita per tahun, meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2024 mencapai Rp. 11.415.000 per kapita per tahun di tahun 2024. Capaian ini masih dibawah pengeluaran per kapita Nasional dan diatas Provinsi Sulawesi Tenggara. Perbandingannya dapat disajikan dalam grafik berikut.

Gambar 2. 11 Perbandingan Capaian Pengeluaran Per Kapita Antara Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2020-2024

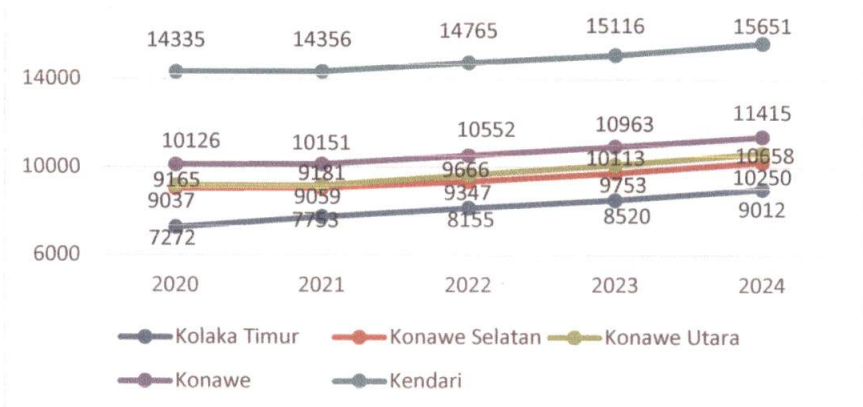


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, data diolah

PARAF KOORDINASI

Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Konawe berada di urutan kedua jika dibandingkan dengan capaian kabupaten / kota sekitar. Kota Kendari menduduki posisi paling tinggi dan Kabupaten Kolaka Timur berada di posisi paling bawah. Perbandingan pengeluaran per kapita tersebut dapat ditunjukkan melalui grafik berikut.

Gambar 2. 12 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Konawe dengan Kabupaten/Kota sekitar tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, data diolah

PARAF KOORDINASI

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

A. Kondisi kemiskinan

1. Kemiskinan

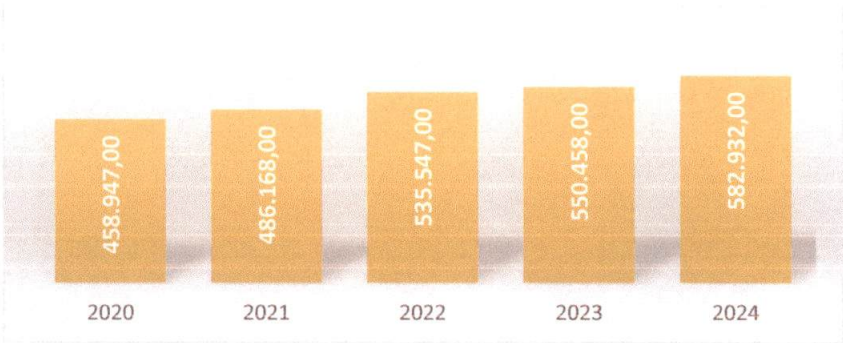
Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi isu global. Rumusan Sustainable Development Goals (SDGs) menempatkan isu tentang pemberantasan kemiskinan dan kelaparan sebagai tujuan yang harus tercapai pada tahun 2030. Isu-isu pembangunan di Indonesia juga menempatkan kemiskinan, ketidakmerataan antar golongan, disparitas regional, dan kekerasan sosial sebagai isu yang penting untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang di tahun 2030.

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang di pakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin menghitung Garis Kemiskinan (GK) nasional yang kemudian menjadi ukuran pencapaian pembangunan setiap tahun. Berdasarkan data yang di publikasikan BPS bahwa perkembangan Garis Kemiskinan Nasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami kenaikan tiap tahun nya . Perkembangan nya Garis Kemiskinan Nasional lima dalam tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 128.280, dapat dilihat pada tahun 2020 Garis Kemiskinan Nasional sebesar 458.947 dan di tahun 2024 sebesar 582.932.

PARAF KOORDINASI

Gambar 3. 1 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, data diolah

Selanjutnya Garis kemiskinan di Sulawesi Tenggara pada periode September 2020 sebesar Rp. 368.529,00 per-kapita per bulan, dibandingkan dengan Kondisi Akhir September 2024 yang mencapai Rp. 473.343,00 perkapita per bulan atau naik sebesar 28,4 persen. Pada periode waktu yang sama, garis kemiskinan daerah perkotaan sebesar Rp. 383.839,00 per kapita per bulan atau naik 28,6% pada tahun 2024 (Rp.493.453,00 per kapita per bulan). Garis kemiskinan di perdesaan juga mengalami peningkatan sebesar 27,9% menjadi sebesar Rp. 460.567,00 per kapita per bulan dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 360.123,00 per kapita per bulan.

Selama Maret 2023-Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,22 persen, yaitu dari Rp. 443.980,- per kapita per bulan pada Maret 2023 menjadi Rp. 462.715,- per kapita per bulan pada Maret 2024. Sementara itu pada bulan September 2023 tidak dilakukan perhitungan kemiskinan oleh BPS, Garis Kemiskinan selama bulan Maret 2024-September 2024 naik sebesar 2,30 persen, yaitu dari Rp. 462.715,- per kapita per bulan menjadi Rp. 473.343,- per kapita per bulan.

PARAF KOORDINASI

Gambar 3. 2 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Kategori Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

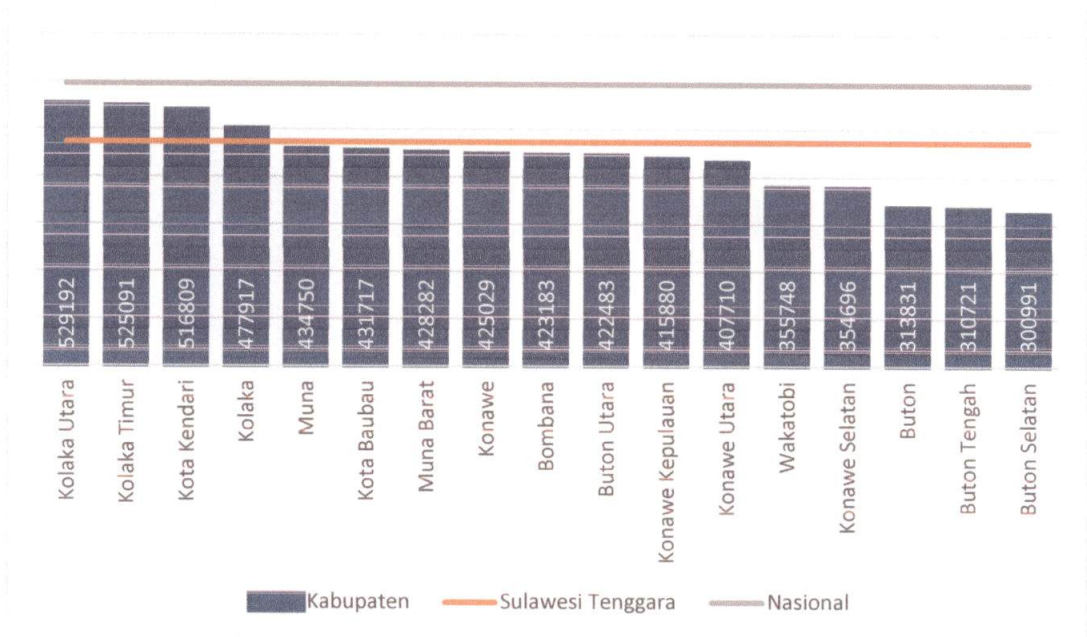
Posisi relatif persebaran garis kemiskinan kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara tahun 2023 (Maret) terhadap provinsi dan nasional dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- Garis Kemiskinan Rendah, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di bawah garis kemiskinan provinsi, terdapat di 13 kabupaten, yaitu Kabupaten Muna, Kota Bau-Bau, Muna Barat, Konawe, Bombana, Buton Utara, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Wakatobi, Konawe Selatan, Buton, Buton Tengah, dan Buton Selatan.
- Garis Kemiskinan Sedang adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di atas garis kemiskinan provinsi dan di bawah garis kemiskinan nasional, terdapat di 4 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kolaka Utara, Kolaka Timur, Kolaka dan Kota Kendari.

Kabupaten/Kota dengan garis kemiskinan paling rendah adalah Kabupaten Buton Selatan sebesar Rp. 300.991,- per kapita per bulan, sedangkan garis kemiskinan paling tinggi adalah Kabupaten Kolaka Utara sebesar Rp. 529.192,- per kapita per bulan. Selanjutnya Garis kemiskinan Kabupaten Konawe pada September 2024 sebesar Rp. 425.029,- per kapita per bulan.

PARAF KOORDINASI

**Gambar 3. 3 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
(September)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

Komponen yang mempengaruhi garis kemiskinan adalah bahan makanan dan non makanan. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar (dominan) dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Komoditi makanan yang berpengaruh cukup besar terhadap garis kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan yaitu beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna/cakalang, telur ayam ras, roti, dan kue basah. Komoditi lainnya relatif berbeda antara perkotaan dan perdesaan. Untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di daerah perkotaan dan perdesaan yakni perumahan, bensin, listrik pendidikan, angkutan dan perlengkapan mandi.

Pada September 2024, jenis komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras memberi sumbangan sebesar 21,01 persen di perkotaan dan 24,93 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (10,67 persen di perkotaan dan 9,76 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah Daging Ayam Ras (4,61 persen di perkotaan dan 3,48

PARAF KOORDINASI

persen di perdesaan), Telur Ayam ras (4,44 persen di perkotaan dan 3,62 persen di perdesaan), Mie Instan (2,63 persen di perkotaan dan 1,97 persen di perdesaan) dan seterusnya. Sedangkan komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar, baik pada GK perkotaan maupun perdesaan, meliputi perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan.

Tabel 3. 1 Komoditi Makanan dan Bukan Makanan Yang Memberi Pengaruh Besar terhadap Garis Kemiskinan di Sulawesi Tenggara
(%), September 2024

Komoditi	Perkotaan	Komoditi	Perdesaan
1	2	3	4
Makanan	73,59	Makanan	75,97
Beras	21,01	Beras	24,93
Rokok kretek filter	10,67	Rokok kretek filter	9,76
Daging Ayam Ras	4,61	Telur Ayam Ras	3,62
Telur Ayam Ras	4,44	Daging Ayam Ras	3,48
Mie Instan	2,63	Gula Pasir	2,36
Kopi bubuk & kopi instan	2,27	Kopi bubuk & kopi instan	2,09
Kue Basah	2,14	Mie Instan	1,97
Roti	1,98	Kue Basah	1,96
Tempe	1,85	Tongkol/tuna/cakala ng	1,83
Tahu	1,81	Roti	1,77
Gula Pasir	1,72	Bawang Merah	1,73
Bawang Merah	1,58	Tempe	1,61
Lainnya	17,15	Lainnya	18,87
Bukan Makanan	26,41	Bukan Makanan	24,03
Perumahan	8,41	Perumahan	8,47
Bensin	4,24	Bensin	4,09
Listrik	2,99	Listrik	1,56
Pendidikan	1,81	Pendidikan	1,14
Perlengkapan Mandi	1,18	Perlengkapan Mandi	1,05
Perawatan Kulit, muka, kuku, rambut	0,68	Sabun cuci	0,69
Kesehatan	0,66	Kesehatan	0,65
Lainnya	6,44	Lainnya	6,08

Sumber : BPS Prov. Sulawesi Tenggara

PARAF KOORDINASI

Selama kurun waktu 2020-2024 kemiskinan di Sulawesi Tenggara mengalami fluktuasi. Kenaikan terjadi di tahun 2020-2021 akibat pandemi covid 19, kenaikan tersebut terlihat dari penduduk miskin tahun 2020 (September) sebanyak 317,32 ribu menjadi 323,26 ribu di tahun 2021 (September). Kemudian pada tahun 2022 (September) jumlah penduduk miskin menjadi 314,74 ribu atau turun sebesar 8,52 ribu orang dari tahun sebelumnya.

Demikian juga pada periode Maret 2023–September 2024 secara persentase penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan data bulan Maret 2023, Persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 7,40 % menjadi 6,78 %, sementara di perdesaan turun dari 13,94 % menjadi 13,07 %.

Tabel 3. 2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024

Tahun	Bulan	Jumlah(Ribu Jiwa)			Persentase		
		Kota	Desa	Kota+ Desa	Kota	Desa	Kota+ Desa
2020	Maret	76,93	224,89	301,82	7,14	13,50	11,00
	September	73,22	244,10	317,32	7,62	13,93	11,69
2021	Maret	75,05	243,65	318,7	7,66	13,89	11,66
	September	71,02	242,25	323,26	7,14	14,34	11,74
2022	Maret	69,94	239,85	309,79	6,95	13,57	11,17
	September	73,71	241,04	314,74	7,22	13,60	11,27
2023	Maret	79,89	241,64	321,53	7,40	13,94	11,43
	September	-	-	-	-	-	-
2024	Maret	82,61	237,10	319,71	7,45	13,60	11,21
	September	75,77	229,50	305,27	6,78	13,07	10,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, data diolah

Persentase tingkat kemiskinan Sulawesi Tenggara pada tahun 2020-2024 masih berada diatas nasional, seperti terlihat pada gambar tersebut.

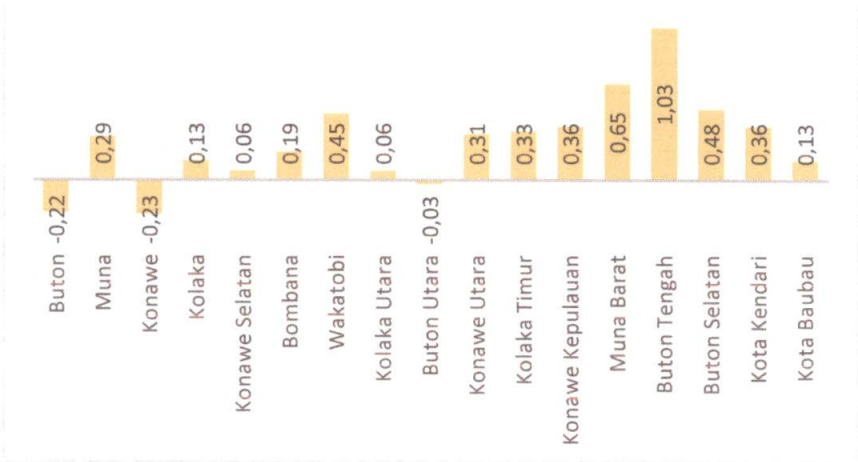
PARAF KOORDINASI

Gambar 3. 4 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)



Apabila dilihat dari rata-rata kinerja penurunan kemiskinan kabupaten/kota se Sulawesi Tenggara pada tahun 2023-2024, Buton Tengah merupakan kabupaten dengan kinerja penurunan yang paling tinggi sebesar 1,03 persen, dan terendah adalah Kolaka Utara dan Konawe Selatan yang masing-masing sebesar 0,06 persen. Sedangkan 3 Kabupaten Lain mengalami kenaikan yaitu Kabupaten Buton, Konawe dan Buton Utara. Kabupaten Konawe rata-rata kinerja penurunan penduduk miskin di tahun 2024 naik sebesar 0,23 poin dari tahun sebelumnya .

Gambar 3. 9 Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023-2024 (%)



Sumber : BPS Prov. Sulawesi Tenggara

PARAF KOORDINASI

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh Pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kabupaten Konawe. Berbagai macam program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta diharapkan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan Perlengkapan mandi. Pada tahun 2024 (september) garis kemiskinan Kabupaten Konawe sebesar Rp.425.029 kapita/bulan mengalami kenaikan dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 323.180 kapita/bulan.

Gambar 3. 14 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Konawe Tahun 2020-September 2024 (Rupiah/Kapita/Bulan)

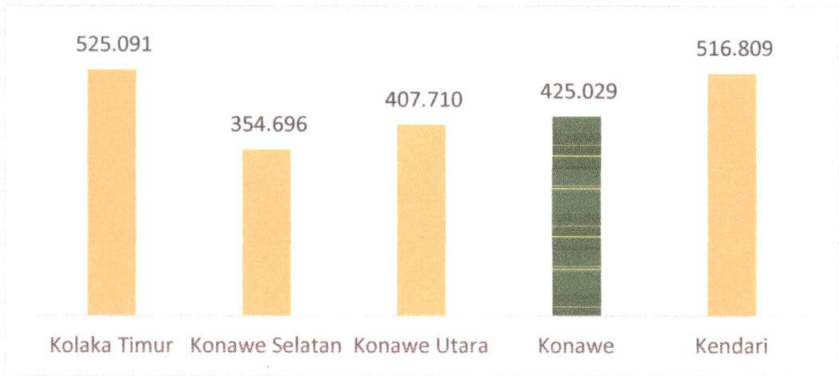


Sumber : BPS Prov. Sulawesi Tenggara

Garis kemiskinan Kabupaten Konawe September 2024 sebesar Rp.425.029,-/kapita/bulan berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara Rp.462.715,-/kapita/bulan dan di bawah Nasional Rp.582.932,-/kapita/bulan. Jika dilihat dari posisi relatif, menempati urutan ketiga tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Posisi tertinggi ditempati Kabupaten Kolaka Timur sebesar Rp.525.091,-/kapita/bulan dan posisi terendah Kabupaten Konawe Selatan Rp.354.696,-/kapita/bulan. Ini menunjukkan biaya hidup di Kabupaten Konawe cukup mahal jika dibandingkan dengan Kabupaten lain disekitarnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

PARAF KOORDINASI

Gambar 3. 19 Posisi relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Konawe September 2024



Sumber : BPS Prov. Sulawesi Tenggara

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Konawe mengalami kenaikan pada periode lima tahun terakhir (2020- September 2024), pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Konawe mencapai 12,20% dan pada September 2024 naik menjadi sebesar 13,25%. Kondisi tersebut relevan dengan Sulawesi Tenggara yang mengalami kenaikan pada periode lima tahun terakhir.

Gambar 3. 24 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Konawe Tahun 2020 – September 2024 (%)



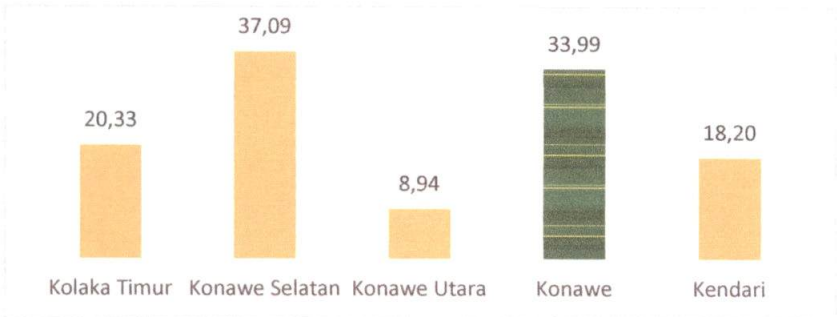
Sumber : BPS Prov. Sulawesi Tenggara

Persentase penduduk miskin Kabupaten Konawe September 2024 sebesar 13,25% berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara 11,21% dan di atas rata-rata Nasional 8,57%. Selanjutnya persentase penduduk miskin Kabupaten Konawe dibandingkan dengan dengan

PARAF KOORDINASI

Kabupaten atau Kota disekitarnya menempati urutan tertinggi kedua setelah Kabupaten Konawe Selatan (37,09). Posisi terendah Kabupaten Konawe Utara sebesar 8,94. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3. 29 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Konawe September 2024 (ribu jiwa)



Sumber : BPS Prov. Sulawesi Tenggara

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata- rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 Kabupaten Konawe tahun 2020 hingga September 2024 mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 1,71 naik menjadi sebesar 2,33 pada September 2024. Kondisi tersebut berbeda dengan Sulawesi Tenggara dan Nasional yang sama-sama mengalami penurunan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 3. 34 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Konawe Tahun 2020 – September 2024

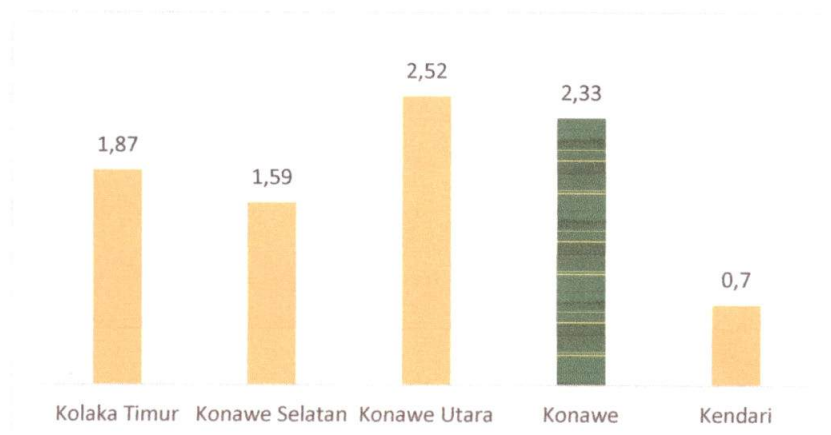


Sumber : BPS Prov. Sulawesi Tenggara

PARAF KOORDINASI

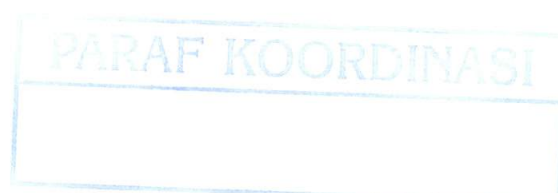
Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Konawe September 2024 sebesar 2,33 berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 1,81 dan Nasional 1,36. Serta dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota disekitarnya berada di posisi kedua setelah Kabupaten Konawe Utara (2,52). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan cukup dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara.

Gambar 3. 39 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Konawe September 2024

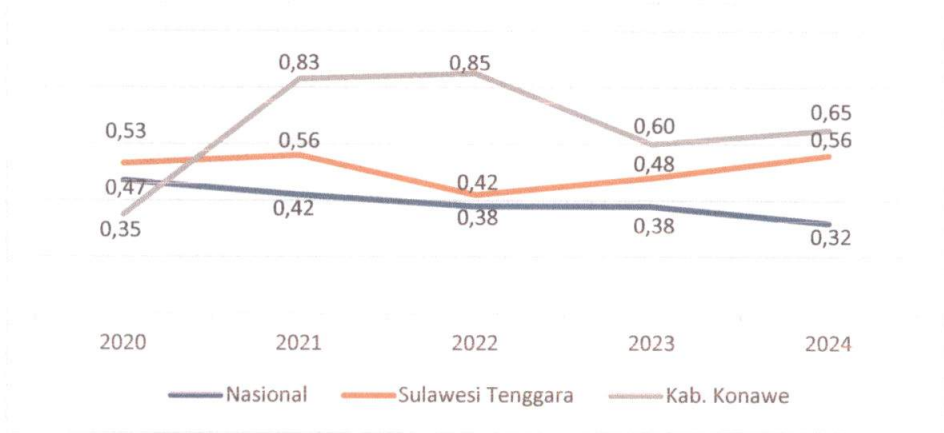


Sumber : BPS Prov. Sulawesi Tenggara

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan satuan indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020- 2024 september) di Kabupaten Konawe menunjukkan tren kenaikan 0,35 tahun 2020 menjadi 0,65 pada September 2024. Kondisi tersebut berbeda dengan Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengalami penurunan dan relevan dengan Nasional yang sama mengalami kenaikan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



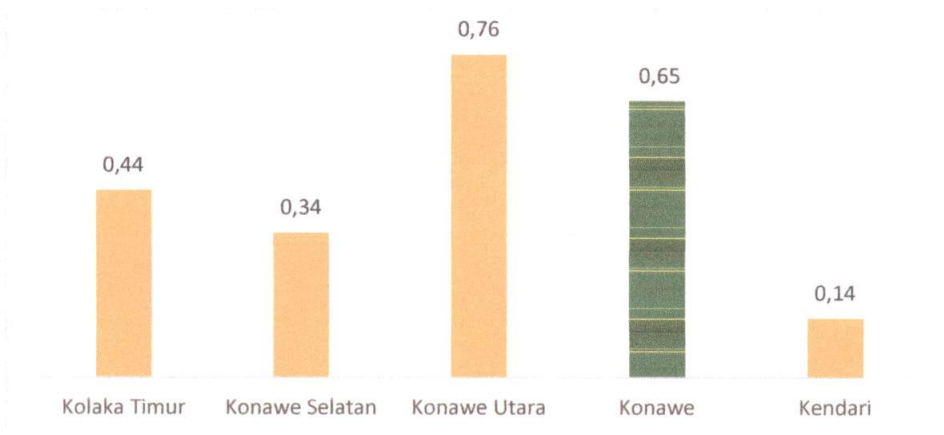
Gambar 3. 44 Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Konawe Tahun 2020 – September 2024



Sumber : BPS Prov. Sulawesi Tenggara

Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Konawe September 2024 sebesar 0,65 berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,56 dan Nasional sebesar 0,32. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitarnya posisi tertinggi Kabupaten Kolaka Timur sebesar 0,64, sedangkan posisi terendah Kota Kendari sebesar 0,13. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3. 49 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Konawe September 2024



Sumber : BPS Prov. Sulawesi Tenggara

PARAF KOORDINASI

Persoalan kemiskinan perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Konawe. Pemerintah perlu lebih fokus dalam penanganan persoalan kemiskinan tanpa langkah yang tepat bisa terjadi ledakan angka kemiskinan, termasuk implementasi program perlindungan sosial, didalamnya terdapat program Jaring Pengaman Sosial bagi rumah tangga miskin dan insentif bagi UMKM yang menampung banyak pekerja sektor informal perlu dilakukan evaluasi terutama ketepatan sasaran program, mengingat belum optimalnya pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Konawe.

2. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "**absolute poverty measure**" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menggunakan definisi tersebut, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang didasarkan pada data Susenas yang dirilis secara berkala oleh BPS, yang pada Maret 2021 adalah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 4%.

Berdasarkan hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2024 sudah cukup besar, yang terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya. Sesuai data dari Kementerian Keuangan, anggaran terkait kemiskinan di tahun anggaran 2024 mencapai Rp.496,8 triliun. Dengan demikian, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem.

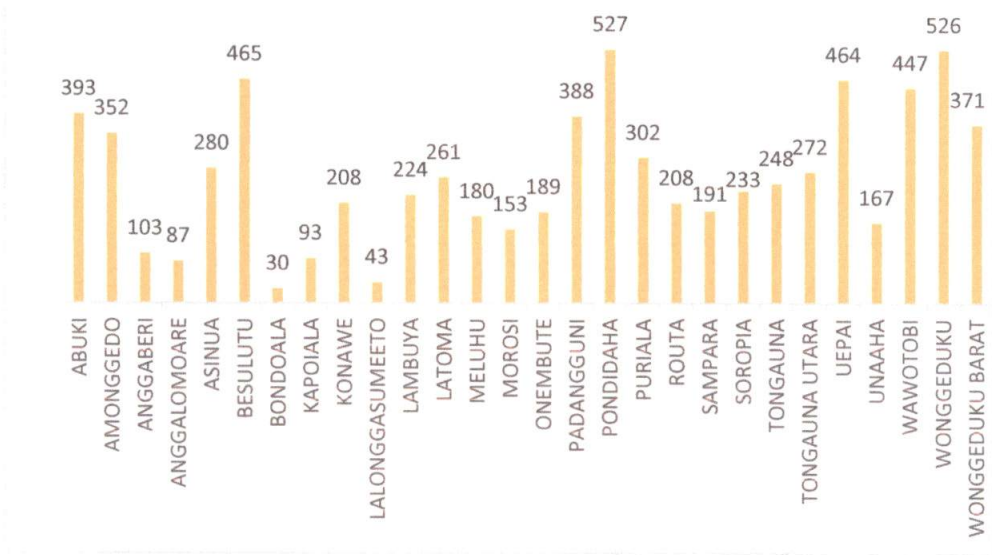
Pada Tahun 2021 pelaksanaan implementasi program tahap I yang dilaksanakan akhir 2021, pemerintah menetapkan tujuh provinsi



priotitas, selanjutnya dari provinsi prioritas tersebut dipilih lima kabupaten/kota, sehingga total wilayah prioritas tahap I berjumlah 35 kabupaten/kota. Penentuan 35 kabupaten/kota tersebut berdasarkan indeks kemiskinan ekstrem yang dirancang untuk mewakili sekitar 20 persen penduduk miskin ekstrem atau 2,1 juta jiwa dari total 10,4 juta penduduk miskin ekstrem secara nasional. Sedangkan untuk perluasan program pada 2022 atau implementasi program tahap II, pemerintah merancang skenario penentuan wilayah prioritas dalam rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengenai koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem pada 25 Agustus 2021. Dalam skenario tersebut, cakupan dari penduduk miskin ekstrem di wilayah prioritas diputuskan mewakili sekitar 75 persen penduduk miskin ekstrem secara nasional. Adapun untuk implementasi tahap III pada 2023-2024, model konvergensi dilakukan secara nasional dan menyeluruh di 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Berdasarkan data P3KE yang telah di olah pada tahun 2023 untuk wilayah Kabupaten Konawe rumah tangga dalam kelompok kondisi 10% terendah (Desil 1) sebanyak 7.405 rumah tangga dengan angka tertinggi di wilayah Kecamatan Pondidaha sebanyak 527 rumah tangga dan angka terendah di wilayah kecamatan Bondoala sebanyak 30 rumah tangga, hal ini dapat di lihat pada gambar berikut :

Gambar 3. 54 Jumlah Rumah Tangga dalam Kelompok dengan Kondisi 10% terendah di Kabupaten Konawe Tahun 2024



Sumber : P3KE Oktober 2024, diolah

PARAF KOORDINASI

BAB IV

PROGRAM PRIORITAS

Dalam dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 disebutkan bahwa visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu **“Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan”**. Hal ini bermakna bahwa keberhasilan Pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara ditandai dengan kondisinya sebagai daerah dengan kehidupan sosial yang harmoni, kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat, pengembangan nilai tambah komoditi unggulan daerah, perlindungan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan. Berdaya Saing yang dimaksud adalah menunjukkan keunggulan Sumber Daya Manusia yang unggul dan kompetitif, pengembangan keunggulan Sumber Daya Alam secara optimal untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, mampu beradaptasi pada perubahan global, mampu bertransformasi di bidang sosial, ekonomi dan tata kelola, pengembangan riset dan inovasi diberbagai sektor. Maju yang dimaksud adalah menuju pembangunan yang unggul, adaptif dan inklusif, menjadi daerah *high income* dan memiliki pengaruh besar dalam perekonomian nasional Menjadi daerah tangguh dalam menghadapi segala tantangan dan situasi krisis dengan kemampuan yang kuat, baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan keamanan, serta memiliki pertahanan yang tangguh dari segala ancaman dari dalam dan luar negeri. Berkelanjutan ditandai dengan kehidupan yang sejahtera dan merata serta lingkungan yang asri dan lestari, menerapkan pembangunan berkelanjutan, kualitas lingkungan yang lebih baik, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik. Pemanfaatan sumber daya alam yang seimbang dan berkelanjutan.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi pijakan dalam penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Adapun Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya Sulawesi Tenggara Maju yang Aman, Sejahtera dan Religius”**. Yang kemudian di operasionalkan kedalam Misi ke 1 yakni “Mewujudkan Masyarakat yang terjamin Hak dan Perlindungan Sosialnya” dan Misi ke 2 yakni “Menumbuhkan perekonomian melalui konektifitas dan penguatan potensi pertanian dalam arti luas, maritim serta dunia usaha”. Kedua Misi tersebut memiliki tujuan dan sasaran yaitu :

PARAF KOORDINASI

Misi 1 Mewujudkan Masyarakat yang terjamin Hak dan Perlindungan Sosialnya

Tujuan : Terwujudnya Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat.

Sasaran : 1. Meningkatnya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas
2. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas dan merata
3. Meningkatkan cakupan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat
4. Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
5. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan daerah

Misi 2 Menumbuhkan Perekonomian Melalui Konektivitas dan Penguatan Potensi Pertanian Dalam Arti Luas, Maritim serta Dunia Usaha

Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah.

Sasaran : 1. Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah
2. Meningkatnya konektivitas wilayah dan kualitas infrastruktur daerah

Ukuran keberhasilan yang diharapkan dari Masing-masing misi adalah Persentase Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Sedangkan target penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan RPJMD 2025-2029 pada akhir periode ditargetkan menjadi sebesar 5,69-5,74 % seperti terlihat pada gambar tabel sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI

Tabel 4. 1 Target Penurunan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	BASELINE		TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
VISI: TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA MAJU YANG AMAN, KEADILAN DAN BERKUALITAS											
MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG TERJAMIN HAK DAN PERLINDUNGAN SOSIALNYA.	TUJUAN 1: Terwujudnya pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial bagi masyarakat	Tingkat Kemiskinan	10,63	10,04-10,54*	10,30-10,50	8,32-8,62	7,41-7,66	6,60-6,70***	5,69-5,74		
		IMM	0,51 (2023)	0,53****	0,54	0,55	0,555	0,560***	0,565		
	SASARAN 1.1: Meningkatnya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas	Indeks Pendidikan	0,705	0,711	0,716	0,722	0,727	0,733	0,738		
	SASARAN 1.2: Meningkatnya pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas dan merata	Usia Harapan Hidup	71,88	72,86*	73,09	73,32	73,55	73,78***	74,01		
		Prevalensi Stunting	26,1	26,1*	24,55	23	21,45	19,9***	18,35		
	SASARAN 1.3: Meningkatnya cakupan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Cakupan Kepesertaan JKN	100,11	98,0*	98,25	98,5	98,75	99***	99,25		
		Cakupan Kepesertaan jaminan Sosial Ketenagakerjaan	38,17	34,11*	37,84	41,56	45,29	49,02***	52,75		
	SASARAN 1.4: Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Indeks Risiko Bencana	151,77	150,00	149,00	148,00	147,00	146,00	145,00		

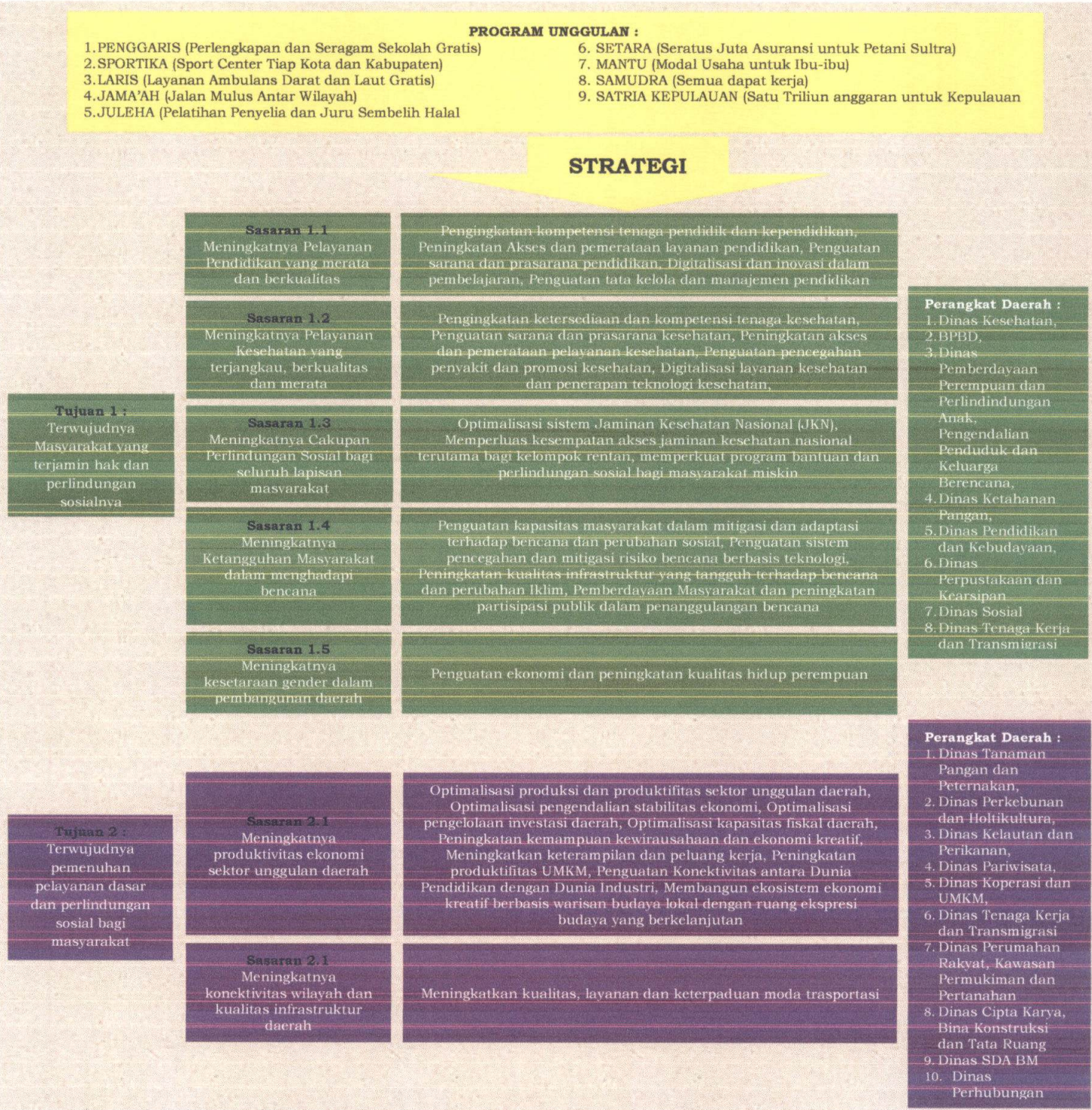
Sumber : RPJMD Prov. Sulawesi Tenggara 2025-2029

Sebagai tindak lanjut pencapaian target tujuan dan sasaran, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan diimplementasikan setiap tahun melalui Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah diharapkan dapat bersinergi dengan semua pihak atau pemangku kepentingan yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan khususnya pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Program prioritas Pembangunan daerah akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD sesuai tugas dan fungsi masing-masing dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan program perangkat daerah. Pada prinsipnya pelaksanaan pembangunan yang akan datang merupakan bagian dari proses pembangunan yang sudah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program pada periode sebelumnya disimpulkan bahwa terdapat sasaran pembangunan yang telah mencapai target, namun terdapat pula sasaran pembangunan yang belum mencapai target sehingga perlu ditindaklanjuti pada periode pemerintahan berikutnya

PARAF KOORDINASI

Gambar 4. 2 Skema Strategi Pencapaian Tujuan RPJMD Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029



Dalam RPJMD Sulawesi Tenggara tahun 2025-2029, disebutkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan langsung dengan Aspek Kesejahteraan Masyarakat dalam Indikator Kinerja Daerah Secara detail dapat dilihat pada Gambar Tabel berikut.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Makro Pembangunan di Sulawesi Tenggara

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Tingkat Kemiskinan	persen	10,04-10,54*	10,30-10,50	8,32-8,62	7,41-7,66	6,60-6,70***
2.	IMM	nilai	0,53****	0,54	0,55	0,555	0,560***
3.	Prevalensi Stunting	persen	26,1*	24,55	23	21,45	19,9***
4.	Usia Harapan Hidup	tahun	72,86*	73,09	73,32	73,55	73,78***
5.	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,467-0,464*	0,460-0,457	0,453-0,451	0,446-0,444	0,439
6.	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,96-6,46*	5,5-6,5	6,75-7,78	7,53-8,44	9,1***
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	2,54-3,04*	2,25-2,50*****	2,43-2,92	2,38-2,86	2,32-2,80***
8.	PDRB Per Kapita	Rp Juta	70,1-70,49*	77,1-79,5	93,1-99,49	104,6-113,99	116,1-128,49***
9.	Cakupan Kepesertaan JKN	Persen	98,0*	98,25	98,5	98,75	99***
10.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	persen	34,11*	37,84	41,56	45,29	49,02***

Sumber : RPJMD Prov. Sulawesi Tenggara 2025-2029

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang menerangkan Visi Pembangunan Konawe dalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan Daerah Kabupaten Konawe yaitu : **"Konawe Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Adil dan**

PARAF KOORDINASI

Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan yakni :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses Pendidikan dan layanan Kesehatan yang berkualitas
2. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi lokal dan inovasi teknologi
3. Mengoptimalkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan partisipatif
4. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat dengan melestarikan kearifan lokal, nilai-nilai tradisional, dan kerukunan antarumat beragama
5. Menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa dan kota

Komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan terlihat secara eksplisit dalam visi pembangunan daerah jangka tersebut yaitu dicantumkannya kata “sejahtera dan adil” sebagai cita-cita dalam pembangunan jangka menengah. Pengertian sejahtera dan adil menunjukkan kondisi masyarakat yang menikmati hidup dengan baik yakni dengan terwujudnya kemakmuran ekonomi, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terpenuhinya kebutuhan dasar yang merata ke seluruh lapisan masyarakat dan wilayah Kabupaten Konawe.

Berdasarkan hasil perumusan visi dan misi RPJMD 2025-2029 Kabupaten Konawe, ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Terkait dengan penanggulangan kemiskinan tercermin dalam Tujuan antara lain :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul;
2. Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Inklusif dan Bedaya Saing;
3. Meningkatkan Efektifitas, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Responsif;
4. Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat;

PARAF KOORDINASI

- 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem Melalui Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan;
- 6. Meningkatkan Aksesibilitas dan Pemerataan Infrastruktur Dasar yang Mendukung Konektivitas Wilayah, Pelayanan Publik, dan Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah

Adapun sasaran, strategi dan arah kebijakan berkaitan dengan tujuan diatas adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 9 Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan
Terkait Penanggulangan Kemiskinan dalam
RPJMD 2025-2029 Kabupaten Konawe**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	1. Meningkatnya kualitas layanan Kesehatan masyarakat	a) Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan secara merata di seluruh wilayah	1. Penanggulangan Kemiskinan dijalankan secara terintegrasi. 2. Ketahanan Pangan diperkuat dari hulu ke hilir 3. Kesehatan untuk semua diwujudkan lewat pemenuhan standar layanan primer dan rujukan, akreditasi fasilitas dan kepastian pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional 4. Perluasan akses pendidikan difokuskan pada revitalisasi sarana belajar, pemerataan dan peningkatan kompetensi guru, digitalisasi pembelajaran, serta penguatan tata kelola satuan pendidikan.
		2. Meningkatnya Kualitas layanan Pendidikan Masyarakat	a) Pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah yang layak dan terjangkau	
2.	Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Inklusif dan Bedaya Saing	1) Meningkatnya Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Penguatan Ekonomi Lokal yang Inklusif	a) Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal b) Penguatan jaringan ekonomi lokal c) Perlindungan sosial ekonomi kelompok rentan	
		2) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	a) Penguatan sektor produktif utama b) Pengembangan infrastruktur ekonomi	
3.	Meningkatnya Efektifitas, Akuntabilitas,	1) Meningkatnya kualitas tata kelola	a) Reformasi birokrasi yang efisien dan responsif	

PARAF KOORDINASI

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Responsif	pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan antikorupsi		5. Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh hilirisasi produk pertanian dan perikanan, pengembangan destinasi agrowisata, serta penguatan UMKM dan koperasi desa/kelurahan merah putih.
4.	Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat	1) Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	a) Penguatan institusi keluarga dan pemberdayaan perempuan	6. Pemerataan infrastruktur desa-kota diarahkan pada peningkatan konektivitas jalan dan transportasi, pelebaran akses air minum aman dan sanitasi layak, perbaikan drainase, serta penataan kawasan permukiman.
5.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem Melalui Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	1) Terwujudnya Kemandirian Pangan yang Berkelanjutan 2) Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas dan Resiliensi terhadap Bencana	a) Penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan lokal a) Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana	7. Tata kelola pemerintahan diperbaiki melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan (SPBE), penguatan pengawasan internal, dan pengadaan yang kompetitif.
6.	Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas wilayah, pelayanan publik, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah	1) Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Pemerataan Akses Infrastruktur Dasar untuk Menurunkan Disparitas Antar Wilayah	a) Akselerasi pembangunan desa tertinggal dan kawasan perdesaan b) Integrasi pembangunan kawasan perdesaan dengan pusat pertumbuhan c) Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pelayanan dasar yang merata	8. Daya tahan sosial-budaya diperkuat lewat pelestarian cagar budaya, peningkatan moderasi beragama dan pencegahan konflik, penurunan kriminalitas berbasis komunitas, serta

PARAF KOORDINASI

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			d) Penguatan konektivitas antar wilayah dalam kabupaten e) Pendekatan pembangunan berbasis spasial dan keadilan wilayah	pengarusutamaan gender, perlindungan anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan. 9. Kualitas lingkungan dan ketahanan bencana ditingkatkan melalui pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah berhirarki 3R, rehabilitasi DAS, dan kesiapsiagaan darurat termasuk layanan penyelamatan kebakaran.

Sumber : RPJMD Kab. Konawe 2025-2029

Berdasarkan uraian dokumen perencanaan diatas, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029, maka Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 terdiri atas tiga tujuan yaitu :

- 1) Terwujudnya pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup Masyarakat miskin (Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur);
- 2) Terwujudnya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin
- 3) Terwujudnya kolaborasi, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Penanggulangan Kemiskinan.

A. Terwujudnya pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup Masyarakat miskin (Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur)

Tujuan yang pertama, yaitu terwujudnya pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin (Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur) akan dicapai melalui

PARAF KOORDINASI

empat strategi, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, Peningkatan Kualitas Kesehatan, Peningkatan Kualitas Pendidikan, dan Peningkatan Aksesibilitas. Masing-masing strategi diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

1. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dengan memastikan kehadiran negara dalam menyelesaikan permasalahan ditengah-tengah masyarakat. Perlindungan dan jaminan sosial sangat perlu diberikan kepada warga miskin yang tergolong tidak produktif, baik karena usia lanjut atau karena merupakan penyandang disabilitas atau kondisi faktualnya tidak memungkinkan untuk diberdayakan. Sesuai amanat konstitusi, negara wajib melindungi dan memberikan jaminan kepada mereka.

Kerentanan perempuan dan anak juga perlu menjadi perhatian. Dampak ketidaksetaraan pada tingkat penyelesaian pendidikan pada masa-masa sebelumnya sudah menurun, namun masih terus dirasakan oleh warga lansia, sementara ketimpangan partisipasi tenaga kerja perempuan Indonesia dibandingkan dengan laki-laki adalah salah satu yang terbesar di tingkat global. Berbagai tantangan kesehatan seksual dan reproduksi menjadi hambatan perempuan. Serta berbagai batasan lainnya yang menghambat perempuan pada partisipasi dikehidupan publik dan profesional dapat membuat perempuan khususnya perempuan lansia terlupakan dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk perlindungan sosial, layanan dasar, dan upaya pemberian bantuan. Mengingat angka usia harapan hidup warga Kabupaten Konawe tergolong tinggi maka terdapat banyak warga tergolong lansia. Dalam hal ini dimungkinkan mereka masuk dalam golongan miskin sehingga harus diberikan jaminan perlindungan sosial.

Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang sosial, yaitu :”Meningkatnya Pemeratan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Penguatan Ekonomi Lokal yang Inklusif”, ”Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif”, dan ”Terwujudnya lingkungan yang berkualitas dan Resiliensi terhadap bencana”. Dengan Indikator Angka Kemiskinan, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Resiko Bencana.

PARAF KOORDINASI

Tabel 4.8. Sasaran Bidang Sosial Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029

No.	Sasaran	Capaian	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Meningkatnya Pemeratan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Penguatan Ekonomi Lokal yang Inklusif						
1.	Angka Kemiskinan	13,27	12,27	12,25	10,12	9,05	8,07
	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif						
2.	Indeks Pembangunan Gender (IKG)	93,81	93,65	93,80	93,95	94,10	94,25
	Terwujudnya lingkungan yang berkualitas dan Resiliensi terhadap Bencana						
3.	Indeks Resiko Bencana	155,79	155,59	155,39	155,19	154,90	154,70

Kebijakan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni :

- 1) Program Perlindungan dan jaminan sosial;
- 2) Program Rehabilitasi Sosial;
- 3) Program Penanganan Bencana
- 4) Program Pemberdayaan Sosial
- 5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- 6) Program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 7) Program Perlindungan Perempuan;
- 8) Program Pemenuhan Hak Anak;
- 9) Program Perlindungan Khusus Anak;
- 10) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 11) Program Penanggulangan Bencana;

2. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Kesehatan penting bagi masyarakat untuk dapat bertahan hidup dan menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi untuk kebutuhan hidupnya. Kesehatan menjadi kunci untuk menentukan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Hal tersebutlah yang menyebabkan Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar untuk dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kesehatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah keadaan

PARAF KOORDINASI

sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan, yaitu "Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat" dengan indikator Angka Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting.

Tabel 4.7. Sasaran Bidang Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029

No.	Sasaran	Capaian	Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat						
1.	Angka Harapan Hidup	70,61	70,71	70,81	70,91	71,01	71,11
2.	Prevalensi Stunting	25	22,84	18,50	16,50	14,50	13,00

Intervensi Pemerintah Kabupaten Konawe dalam bentuk Program dan Kegiatan yang dapat mendukung indikator Kesehatan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran oleh Perangkat Daerah Kabupaten Konawe yang didukung oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adapun bentuk program yang dilaksanakan adalah :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

3. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Kemiskinan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan muncul karena sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Untuk itu pendidikan yang berkualitas menjadi penting bagi setiap orang. Diharapkan setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, dan menjadi lebih produktif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Sumberdaya manusia inilah yang akan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Konawe.

Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, yaitu "Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat" dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.

PARAF KOORDINASI

Tabel 4.7. Sasaran Bidang Pendidikan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029

No.	Sasaran	Capaian	Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat							
1.	Rata Rata Lama Sekolah	9,69	9,75	10,09	10,43	10,77	11,11
2.	Harapan Lama Sekolah	13,05	13,26	13,36	13,46	13,56	13,66

Indikasi program tersebut didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kedua perangkat daerah ini mendukung pencapaian dalam bentuk program yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pembinaan Perpustakaan

4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat

Kondisi geografis merupakan penghambat kemajuan bagi sebagian masyarakat, khususnya warga miskin. Sulitnya warga miskin melakukan mobilitas dari lokasi tempat tinggalnya menuju tempat-tempat layanan publik seperti sekolah, pasar, puskesmas, dan lain-lain. Sehingga akses yang memadai juga akan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain Jalan, perumahan dan permukiman yang layak huni dan bebas kumuh akan mendorong kapasitas hidup manusia serta dapat sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur, yaitu "Meningkatnya pemerataan pembangunan antar desa melalui pengurangan kesenjangan antara desa tertinggal dan desa berkembang/maju" dan "Terwujudnya Pemeratan Infrastruktur Dasar Wilayah", dengan indikator Indeks Desa Membangun dan Rasio Konektivitas Wilayah.

Tabel 4.7. Sasaran Bidang Infrastuktur Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029

No.	Sasaran	Capaian	Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Pemerataan Akses Infrastruktur Dasar untuk menurunkan Disparitas Antar Wilayah							
1.	Persentase Desa Mandiri	0,000	0,003	0,014	0,021	0,027	0,034

PARAF KOORDINASI

2.	Rasio Konektivitas Wilayah	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81
----	----------------------------	------	------	------	------	------	------

Indikasi Program tersebut didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Perhubungan, melaksanakan program yaitu:

- 1) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 3) Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 5) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 6) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 7) Program Kawasan Permukiman
- 8) Program Pengembangan Perumahan
- 9) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- 10) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 11) Program Pengelolaan Pelayaran

B. Terwujudnya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin

Sasaran yang kedua, yaitu terwujudnya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin atau kurang mampu untuk terlibat dan mengambil manfaat dari porses pembangunan. Tujuan kedua ini berkaitan dengan sasaran pada RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 yakni : "Terwujudnya Kemandirian Pangan yang Berkelanjutan", "Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi" dan "Meningkatnya Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Penguatan Ekonomi Lokal yang Inklusif". Tujuan kedua akan dicapai melalui tiga strategi, yaitu : Pengembangan Pertanian dan Perikanan, Penguatan Usaha Mikro dan Usaha kecil, Masing-masing strategi diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

1. Pengembangan Pertanian dan Perikanan

Sektor pertanian dan perikanan terus dikembangkan karena merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Konawe. Hal itu berarti banyak warga Kabupaten Konawe bekerja pada sektor

PARAF KOORDINASI

pertanian dan perikanan. Selain itu, data menunjukkan bahwa pekerjaan sebagian besar warga miskin adalah petani dan nelayan. Dengan demikian pengembangan sektor pertanian dan perikanan dapat menjadi salah satu penopang dalam upaya penanggulangan kemiskinan dibidang Ketahanan Pangan.

Dengan kontribusi yang besar terhadap perekonomian, sektor pertanian dan perikanan perlu diintervensi melalui program dan kegiatan pembangunan yang efektif. Selain itu produktivitas pertanian dan perikanan juga perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk optimalisasi sumberdaya guna mencapai ketahanan pangan. Indikator pembangunan bidang Ketahanan Pangan yaitu "Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of undernourishment) dan "Laju Pertumbuhan Ekonomi".

Tabel 4.7. Sasaran Bidang Ketahanan Pangan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029

No.	Sasaran	Capaian	Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Kemandirian Pangan yang Berkelanjutan							
1.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	17,14	15,80	14,50	13,20	11,90	10,50
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi							
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	11,82	15,43	18,32	17,28	16,16	14,79

Indikasi program penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, melaksanakan program :

- 1) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 4) Progran Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 5) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 7) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 8) Program Penyuluhan Pertanian
- 9) Program Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian
- 10) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 11) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

PARAF KOORDINASI

12) Program Penyuluhan Pertanian

2. Penguatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pengembangan ekonomi melalui penguatan usaha mikro dan usaha kecil dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil berhasil difasilitasi untuk berkembang maka pendapatan mereka akan meningkat.dengan demikian daya beli membaik. Pada gilirannya tingkat kesejahteraan meningkat. Langkah pertama yang dapat ditempuh adalah melakukan pendataan dan pengelompokan sesuai jenis usaha dan sesuai kapasitas usaha kemudian melakukan pendampingan mulai dari proses produksi, pengemasan, pemasaran, hingga perizinan usaha dan permodalannya.

Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat memberikan implikasi positif terhadap penanggulangan kemiskinan melalui program dan kegiatan peningkatan kualitas tenaga kerja. Seperti halnya penanggulangan bidang Sosial, Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Bidang Tenaga Kerja yaitu :”Meningkatnya Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Penguatan Ekonomi Lokal yang Inklusif” dengan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tabel 4.7. Sasaran Bidang Tenaga Kerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029

No.	Sasaran	Capaian	Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Penguatan Ekonomi Lokal yang Inklusif						
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,95	2,88	2,75	2,70	2,50	2,10

Program penanggulangan kemiskinan bidang Usaha Mikro dan Usaha Kecil didukung oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

- 1) Program Hubungan Industrial
- 2) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 3) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- 4) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

PARAF KOORDINASI

C. Terwujudnya Konvergensi, Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Penanggulangan Kemiskinan.

Tujuan yang ketiga adalah untuk mengakomodir kegiatan atau mendukung program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pengaturan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dimaksudkan agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat melibatkan semua pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan aspek pembangunan yang melibatkan instansi pemerintah yang secara umum disebut dalam istilah Reformasi Birokrasi. Sebagaimana arah kebijakan Reformasi Birokrasi disebutkan penanggulangan kemiskinan merupakan isu prioritas dalam Reformasi Birokrasi Tematik.

Dalam rangka penguatan kelembagaan yang diperlukan adalah penyederhanaan mekanisme kerja, penguatan koordinasi, dan monitoring-evaluasi. Penyederhanaan mekanisme kerja dilakukan misalnya dengan perbaikan regulasi-regulasi atau prosedur pengambilan kebijakan dengan menyesuaikan tata kelola informasi akan lebih mengoptimalkan kelembagaan TKPK. Dengan sistem yang terintegrasi, perangkat daerah dapat mengurangi ketergantungan pada prosedur manual dalam pengelolaan data sosial dan ekonomi. Hal ini akan mempercepat proses pengambilan kebijakan yang lebih berbasis bukti, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta memperbaiki efektivitas program sosial.

Dalam strategi penguatan kelembagaan juga dimuat penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama aparatur pemerintah yang merumuskan kebijakan dan menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Esensi dari strategi penguatan kelembagaan adalah untuk memastikan program-program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Strategi penguatan kelembagaan diarahkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, serta inovasi penanggulangan kemiskinan agar selaras untuk mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam program-program untuk menunjang program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh 4 (empat) Perangkat Daerah yakni: Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Program-program dimaksud meliputi 7 (tujuh) program yaitu:

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 2) Program Perekonomian dan Pembangunan;



- 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 4) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 6) Program Pencatatan Sipil
- 7) Program Pendaftaran Penduduk;
- 8) Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan
- 9) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

**Tabel 4.8. Sasaran Bidang Sosial Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029**

No.	Sasaran	Capaian	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Antikorupsi							
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	65,82	68,00	71,00	73,00	76,00	79,00

PARAF KOORDINASI

Tabel 4. 10 Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029

No	Urusan	Strategi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029	
									Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Menurunkan Penduduk Miskin, Mewujudkan PPKS yang Mandiri Menurunkan Penduduk Miskin, Mewujudkan PPKS yang Mandiri	Menurunkan Angka Kemiskinan	1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	80	64.609.000	80	437.862.500	80	439.425.000	80	442.550.000	80	456.800.000
					1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks) Lainnya Di Luar Hiv/Aids Dan Napza Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	80	399.265.000	88	1.294.600.000	88	1.304.600.000	88	1.359.600.000	88	1.395.600.000
					1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks) Lainnya Di Luar Hiv/Aids Dan Napza	%	80	150.750.000	80	421.312.500	80	424.125.000	80	440.750.000	80	453.000.000

PARAF KOORDINASI

No	Urusan	Strategi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Target 2025			Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029	
								Satuan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
			Terpenuhi ya Kebutuhan Masyarakat yang Terdampak Bencana	Menurun nya Angka Kemiskina n	1.06. 06	Program Penangan an Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	364.71 9.000	100	933.60 0.000	100	963.60 0.000	100	978.60 0.000	100	993.60 0.000
2.	Urusan Pemerin ntahan Bidang Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak	Perlindun gan dan Jaminan Sosial	Meningkat nya Kesetaraan Gender dan Perlindung an Anak	Indeks Pembangu nan Gender (IPG)	2.08. 05	Program Pengelola an Sistem Data Gender Dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender Dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi Dan/Atau Penyusunan Kebijakan	%	100	39.760. 000	100	125.00 0.000	100	126.00 0.000	100	126.00 0.000	100	127.00 0.000
					2.08. 02	Program Pengarus utamaan gender dan Pemberd ayaan Perempu an	Persentase Anggaran Responsif Gender (Arg)	%	20	308.64 1.000	30	1.009.4 84.300	35	1.030.4 40.300	40	1.019.0 76.550	45	1.044.3 72.956
					2.08. 03	Program Perlindung an Perempu an	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan	%	100	207.60 0.000	98	467.50 0.000	98	482.50 0.000	99	388.00 0.000	99	443.00 0.000

PARAF KOORDINASI

No	Urusan	Strategi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Target 2025			Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029	
								Satuan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Layanan Komprehensif											
					2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (Ipha)	Indeks	54	288.490.000	55	563.000.000	56	487.200.000	57	620.707.500	58	651.742.875
					2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	285.853.500	100	690.000.000	100	757.500.000	100	702.000.000	100	877.500.000
					2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Tingkat Pemanfaatan Layanan Pembelajaran Keluarga Yang Sesuai Standar	%	100	124.553.000	100	765.000.000	100	816.250.000	100	817.562.500	100	818.940.625
					3.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Dalam Penanganan Darurat Bencana	Indeks Resiko Bencana	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Bencana, Penanganan Tanggap Darurat Bencana, Penanganan Pasca Bencana	%	100	11.053.424.850	100	3.391.980.000	100	2.855.458.500
4.	Urusan Pemerintahan Bidang	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	Angka Harapan Hidup (AHH)	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi	%	100	52.292.059.940	100	64.870.700.704	100	64.074.549.834	100	61.595.989.805	100	62.050.084.681

PARAF KOORDINASI

No	Urusan	Strategi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Target 2025			Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029	
								Satuan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
	Kesehatan	Peningkatan Kualitas Kesehatan				Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat												
						1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan	%	100	311.362.200	100	1.025.000.000	100	1.025.000.000	100	800.000.000	100	1.025.000.000
5.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Keluarga Berencana	Prevalensi Stunting	2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Presentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	62	4.350.539.000	63	1.890.911.960	64	1.843.946.520	65	1.896.996.253	70	1.850.061.235
6.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		Aksebilitas Pendidikan Meningkatkan	Rata-Rata Lama Sekolah	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Serta Pendidikan Kesetaraan	%	100	94.425.398.525	100	78.348.696.007	100	81.357.212.956	100	87.818.172.082	100	97.978.061.317

PARAF KOORDINASI

No	Urusan	Strategi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Target 2025			Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029	
								Satuan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
		Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat	Meningkatnya literasi masyarakat	Harapan Lama Sekolah	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks	60	866.206.500	10	2.220.000.000	20	1.880.000.000	28	2.240.000.000	35	2.240.000.000
7.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Meningkatnya Status Desa yang Berdaya Saing	Indeks Desa Membangun (IDM)	2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	%	75	608.880.950	75	704.193.450	75	829.949.997	75	1.052.541.245	75	1.467.355.803
					2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Desa (Lkd)	%	75	876.050.200	75	919.800.200	75	1.007.352.710	75	1.140.845.343	75	1.364.137.608
					2.13.03	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	%	100	40.423.000	100	46.673.000	100	54.944.150	100	69.566.357	100	96.794.674
8.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				Meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai	Rasio Konektivitas Wilayah	1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak Dan Aman)	%	94	4.622.256.902	95	9.980.908.755	96	10.853.910.177	97	10.467.698.482

PARAF KOORDINASI

No	Urusan	Strategi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Target 2025			Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029	
								Satuan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
		Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai	Rasio Konektivitas Wilayah	1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas Yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	12	1.643.369.000	14	2.931.567.853	14	2.973.394.942	14	3.286.221.023	14	3.330.070.836
			1.03.02		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	%	78	17.723.229.350	78	11.439.584.000	79	15.924.042.750	80	15.440.103.093	81	12.588.543.369	
			1.04.03		Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani	%	70	1.494.415.900	70	2.757.741.000	70	2.898.450.150	75	3.154.567.653	80	3.640.513.094	

PARAF KOORDINASI

No	Urusan	Strategi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Target 2025			Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029	
								Satuan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
9.		Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat	Meningkatnya jumlah rumah layak huni dan kawasan permukiman yang tertata, bebas kumuh, dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta memiliki legalitas dan administrasi yang tertib.	Rasio Konektivitas Wilayah	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	647.098.850	100	2.265.062.250	100	2.539.924.737	100	3.168.889.723	100	4.426.021.709
					1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Permukiman Yang Sudah Dilengkapi Psu (Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum)	%	75	688.075.300	75	1.695.000.000	75	1.695.000.000	80	1.695.000.000	80	1.695.000.000
			Meningkatnya infrastruktur transportasi serta keselamatan dan ketertiban transportasi		2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	100	11.351.218.000	100	12.128.750.000	100	11.525.000.000	100	9.757.593.750	100	8.807.783.593
			Meningkatnya infrastruktur transportasi		2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Konektivitas Laut	Indeks	40	17.750.000	42	253.125.000	44	256.750.000	50	63.525.000	55	76.576.250

PARAF KOORDINASI

No	Urusan	Strategi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Target 2025			Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029	
								Satuan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
			i serta keselamatan dan ketertiban transportasi															
10.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	100	66.545.000	100	577.000.000	100	577.000.000	100	577.000.000	100	577.000.000
					2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	82	2.886.839.800	83,5	2.352.000.000	84	2.371.000.000	84,5	2.388.000.000	85	2.405.000.000
11.	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan produksi perikanan melalui penguatan sarana prasarana dan pendampingan kepada Nelayan pembudidaya ikan.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	TON	2184	669.856.000	2196	1.451.259.000	2208	1.244.079.285	2220	1.264.975.550	2232	1.292.615.913
					3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	TON	3652	119.409.500	3701	2.441.669.000	3832	2.863.691.000	4023	3.288.365.000	4224	3.693.058.000
					3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan Olahan	TON	1200	134.789.000	1200	626.000.000	1200	692.000.000	1200	763.500.000	1200	1.033.000.000

PARAF KOORDINASI

No	Urusan	Strategi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Target 2025			Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029	
								Satuan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
12.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Pengembangan Pertanian dan Perikanan	Tercapainya Peningkatan Populasi Ternak Secara Signifikan Berdasarkan Data Terukur secara Berkelanjutan.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian Terhadap Peternak Dan Kelompok Ternak	%	30	2.994.224.000	35	4.020.823.783	40	4.128.001.611	45	4.745.242.172	50	5.007.546.448
					3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	65	2.735.664.750	70	2.183.163.816	75	2.361.495.914	80	2.426.826.511	85	2.488.368.663
					3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Sdm Kelompok Tani Ternak Dan Penyuluh Peternakan	%	20	285.699.000	25	725.000.000	30	780.000.000	35	825.000.000	40	885.000.000
			Meningkatnya efektivitas pengendalian wabah penyakit hewan dan pelayanan perizinan usaha peternakan.		3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanggulangan Wabah Hewan Yang Ditangani	%	-	-	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
			Meningkatkannya produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan		3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	%	7,59	10.033.324.500	13,28	6.877.083.125	15,7	7.114.635.203	19	7.352.488.583	19,38	7.590.650.797

PARAF KOORDINASI

No	Urusan	Strategi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Target 2025			Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029	
								Satuan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
		Pengembangan Pertanian dan Perikanan	n dan hortikultura melalui penyediaan dan pengembangan sarana serta prasarana pertanian yang memadai, serta pelaksanaan penyuluhan pertanian yang efektif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Diberi Bantuan Prasarana Pertanian	%	80	14.267.469.520	85	16.421.207.353	87	17.229.791.630	90	19.261.066.829	93	18.998.787.788
			3.27.07		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Sdm Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan	%	50	5.324.967.000	53	1.090.000.000	55	1.090.000.000	57	1.090.000.000	60	1.090.000.000	
			Meningkatkannya ketahanan dan pengembangan usaha pertanian melalui pengendalian bencana yang efektif dan perizinan usaha yang cepat serta terintegrasi guna mendukung produktivitas dan		3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	100	56.301.000	100	670.000.000	100	670.000.000	100	670.000.000	100	670.000.000

PARAF KOORDINASI

No	Urusan	Strategi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029	
									Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
			kesejahteraan petani															
13.	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Penguatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Kesejahteraan Tenaga Kerja Meningkat	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Pekerja Pada Perusahaan Yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Dan Dialog Sosial	%	100	900.480.960	100	1.085.000.000	100	1.090.000.000	100	1.110.500.000	100	1.120.000.000
			Menurunkan Angka Pengangguran Terbuka . Kesejahteraan Tenaga Kerja Meningkat		2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Prioritas Yang Meningkatkan Produktivitasnya	%	25	60.305.500	50	965.000.000	60	973.000.000	70	975.000.000	80	995.000.000
					2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Di Dalam Negeri	%	74	149.244.000	74	500.000.000	75	500.000.000	76	500.000.000	77	500.000.000
			Terwujudnya Kawasan Transmigrasi yang Berdaya Saing		3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Presentase Program Transmigrasi Yang Dilaksanakan	%	100	109.340.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000
14.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil		Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan Pengembangan usaha mikro		2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan	Persentase Usaha Kecil Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal	%	50	2.547.910.000	50	4.795.014.475	50	4.847.489.836	50	4.901.277.081	50	4.956.409.008

PARAF KOORDINASI

No	Urusan	Strategi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Target 2025			Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029	
								Satuan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
	dan Menengah					Usaha Mikro (Umkm)												
15.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Terwujudnya Konvergensi, Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Reformasi Birokrasi	2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	100	142.382.000	100	395.000.000	100	395.000.000	100	395.000.000	100	395.000.000
					2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	100	439.472.000	100	585.000.000	100	585.000.000	100	585.000.000	100	585.000.000
					2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan	%	100	68.124.000	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000
					2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	5.390.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000
					7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana	%	100	1.085.920.350	100	1.176.000.000	100	672.000.000	100	672.000.000	100	672.000.000
16.	Kecamatan		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan, terstandar, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat															

PARAF KOORDINASI

No	Urusan	Strategi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Target 2025			Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029	
								Satuan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
17.	Sekretariat Daerah	Terwujudnya Konvergensi, Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemerintahan serta pembangunan ekonomi masyarakat.	Indeks Reformasi Birokrasi	4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kegiatan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Dilaksanakan Melalui Kegiatan Koordinasi Dan Fasilitasi Yang Efektif	%	100	9.141.354.000	100	7.652.049.750	100	7.830.798.335	100	8.185.565.634	100	8.915.469.616
					4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Kegiatan Perekonomian Dan Pembangunan Daerah Yang Dilaksanakan Melalui Kegiatan Koordinasi Kebijakan Dan Pengelolaan Strategis	%	100	1.599.257.300	100	2.224.800.000	100	2.420.800.000	100	2.556.800.000	100	2.712.060.000
18.	Perencanaan		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta koordinasi pembangunan daerah yang terpadu		5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Rkpd Dengan Renja Pd Pada Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	%	100	1.743.388.450	100	1.743.388.450	100	1.743.388.450	100	1.743.388.450	100	1.743.388.450

PARAF KOORDINASI

No	Urusan	Strategi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Target 2025			Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029	
								Satuan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
			dan berkesinambungan															
19.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika		Meningkatnya respon dan efektivitas tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui aplikasi digital	Indeks Reformasi Birokrasi	2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	%	50	985.283.550	65	1.275.000.000	75	1.475.000.000	85	1.655.000.000	95	1.745.000.000

PARAF KOORDINASI

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan sebuah proses yang berkesinambungan meliputi pengumpulan data, proses dan pemilihan informasi mengenai implementasi kegiatan, progres yang akan dicapai sampai kepada dampak dan efek dari adanya program/kegiatan tersebut. Prinsip dalam proses monitoring dan evaluasi adalah dengan membandingkan dari apa yang sudah direncanakan dengan yang dilaksanakan dan dihasilkan. Substansi yang dibandingkan adalah indikator. Maka menjadi penting dalam proses monev ini adalah bagaimana men set-up indikator pada saat proses perencanaan, agar dapat dilakukan monev dengan baik dalam rangka mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam satu manajemen pembangunan.

Monitoring merupakan aktivitas internal kegiatan yang dirancang untuk mengidentifikasi feedback konstan pada setiap progres dari kegiatan tersebut, termasuk masalah-masalah yang dihadapi dan efisiensi dari implementasi kegiatan tersebut. Monitoring juga merupakan proses berkelanjutan dalam mengumpulkan informasi-informasi mengenai apa yang telah direncanakan dalam sebuah kegiatan, termasuk di dalamnya adalah asumsi-asumsi atau faktor-faktor eksternal dan efek samping dari terlaksananya kegiatan tersebut. Monitoring lebih dimaksudkan untuk menilai apakah sumber kegiatan (input) akan dilaksanakan dan digunakan dalam menghasilkan output yang dituju. Monitoring dilakukan untuk lebih melihat dan mencari informasi pelaksanaan di level program dan/atau kegiatan.

Evaluasi merupakan proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program/kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program/kegiatan. Evaluasi pada dasarnya akan bermanfaat dalam merancang program/kegiatan yang lebih baik di masa depan. Evaluasi juga bermanfaat untuk mampu mengidentifikasi dampak dari sebuah program/kegiatan, sehingga dampak negatifnya dapat direduksi bahkan dihilangkan. Evaluasi dilaksanakan lebih untuk menilai pencapaian program dan kebijakan atau sasaran pembangunan, dan bukan pada kegiatan.

PARAF KOORDINASI

1. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

Sesuai dengan tugas dan fungsi TKPK Kabupaten/Kota dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota bahwa salah satu fungsi TKPK Kabupaten/Kota adalah penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam hal efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi TKPK Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan. Sekretariat TKPK Provinsi dan Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
- c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
- d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota.

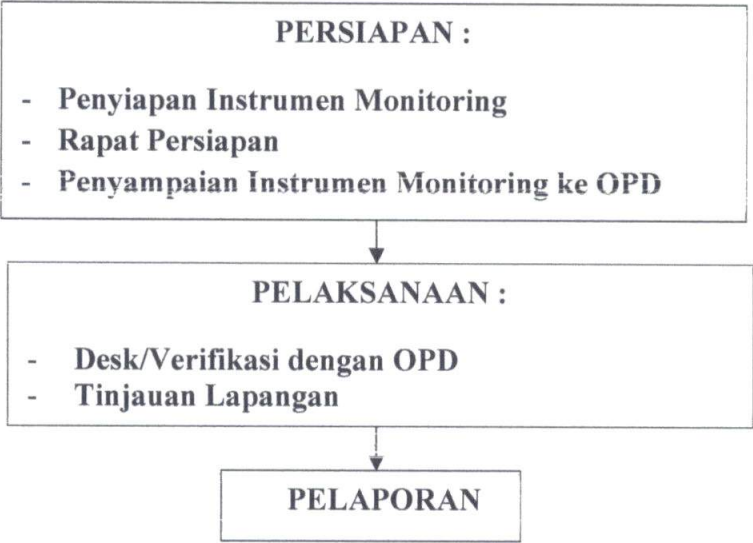
Dalam hal pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota, disebutkan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 bahwa Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Alur Proses Monitoring dan Evaluasi

Alur proses monitoring dan evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

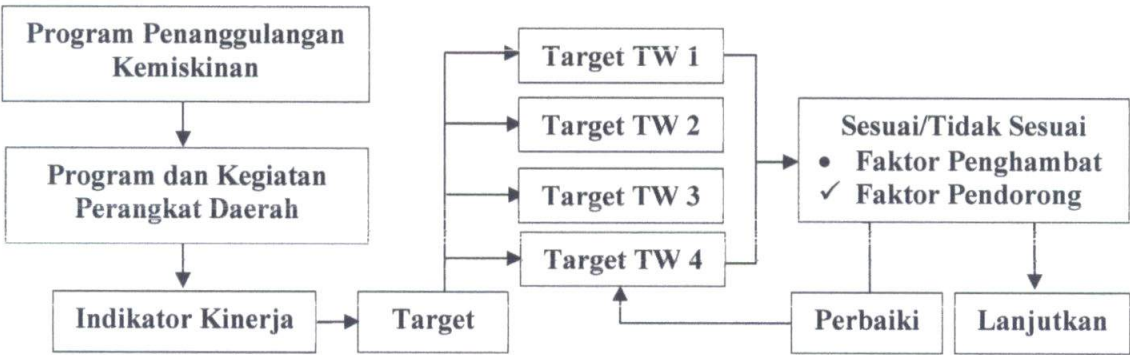


Gambar 4. 7 Alur Proses Monitoring dan Evaluasi



Monitoring capaian program penanggulangan kemiskinan dilakukan secara berkala dalam triwulan bersamaan dengan monitoring terhadap capaian program dan kegiatan prioritas perangkat daerah. Substansi yang dilakukan monitoring adalah indikator kinerja pada setiap program dan kegiatan (output dan outcome) yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan dengan melakukan pencatatan informasi pelaksanaan kegiatan

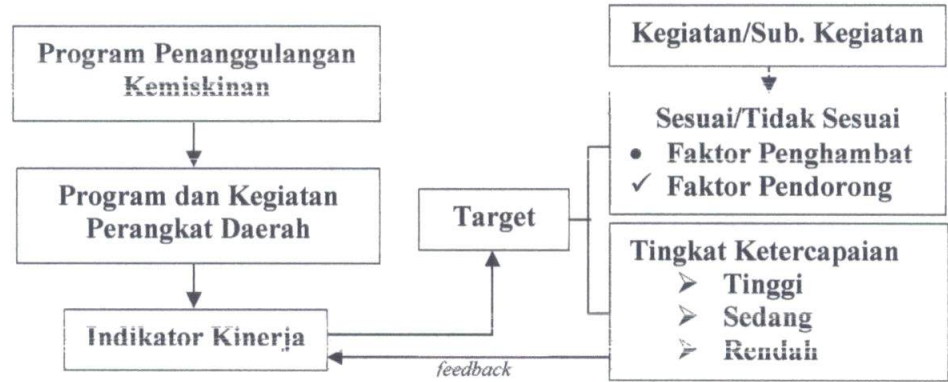
Gambar 4. 12 Substansi Monitoring



PARAF KOORDINASI

Sedangkan proses evaluasi capaian program penanggulangan kemiskinan dilakukan secara berkala tahunan dengan membandingkan target dengan realisasi setiap indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah yang menjadi jabaran dari program penanggulangan kemiskinan. Substansi yang dilakukan evaluasi adalah tingkat ketercapaian dari seluruh indikator kinerja program dan kegiatan, serta analisis efektivitas dan efisiensi dari program dan kegiatan yang dilakukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Gambar 4. 17 Substansi Evaluasi



3. Instrumen Monitoring dan Evaluasi

Instrumen yang digunakan untuk monitorng adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 11 Instrumen Monitoring

No	Masa lah	Program/ KegiatanP rioritas PD	Indik ator Kiner ja	Sat uan	Tar get TW*)	Real i sasi TW*)	Target Akhir Tahun	Faktor Pengh ambat /Pend orong	Saran Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:
Kolom (1) : Diisikan nomor
Kolom (2) : Diisikan uraian masalah determinan per bidang

PARAF KOORDINASI

- Kolom (3) : Diisikan nomenklatur program dan kegiatan OPD yang mendukung program penanggulangan kemiskinan
- Kolom (4) : Diisikan indikator kinerja program dan kegiatan OPD yang sesuai dengan RKPD dan APBD
- Kolom (5) : Diisikan satuan indikator kinerja program dan kegiatan OPD
- Kolom (6) : Diisikan target kinerja triwulan yang telah direncanakan di awal tahun anggaran (sesuai dengan pelaksanaan triwulan)
- Kolom (7) : Diisikan realisasi kinerja triwulan
- Kolom (8) : Diisikan target kinerja sampai akhir tahun perencanaan
- Kolom (9) : Diisikan faktor penghambat dan/atau pendorong bagi pelaksanaan kegiatan
- Kolom (10): Diisikan saran tindak lanjut (diisi oleh pelaksana monitoring

Instrumen yang digunakan untuk evaluasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 12 Instrumen Evaluasi

No	Masa lah	Program/ KegiatanP prioritas PD	Indik ator Kinerja	Sat uan	Target Tahun n	Realis asi Tahun n	Target Angga ran	Realis asi Angg aran	Tingkat Keterca paian	Faktor Pengh ambat /Pend orong
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- Keterangan:
- Kolom (1) : Diisikan nomor
 - Kolom (2) : Diisikan uraian masalah determinan per bidang
 - Kolom (3) : Diisikan nomenklatur program dan kegiatan OPD yang mendukung program penanggulangan kemiskinan
 - Kolom (4) : Diisikan indikator kinerja program dan kegiatan OPD yang sesuai dengan RKPD dan APBD
 - Kolom (5) : Diisikan satuan indikator kinerja program dan kegiatan OPD

PARAF KOORDINASI

- Kolom (6) : Diisikan target kinerja tahunan yang telah direncanakan di awal tahun anggaran (sesuai dengan APBD)
- Kolom (7) : Diisikan realisasi kinerja tahunan
- Kolom (8) : Diisikan target anggaran program dan kegiatan tahunan sesuai APBD
- Kolom (9) : Diisikan realisasi anggaran program dan kegiatan tahunan
- Kolom (10): Diisikan tingkat ketercapaian indikator kinerja program dan kegiatan dengan membagi 3 kelompok ketercapaian yaitu:
- a. Tinggi, jika ketercapaiannya lebih dari sama dengan 100% ($\geq 100\%$);
 - b. Sedang, jika ketercapaiannya antara 80-99%;
 - c. Rendah, jika ketercapaiannya
- Kolom (11): Diisikan faktor penghambat dan/atau pendorong bagi pelaksanaan kegiatan



BAB V
LOKASI PRIORITAS

Pada bab ini akan diuraikan profil kemiskinan di semua Kecamatan, dilanjutkan dengan uraian Profil kemiskinan per kecamatan yang mencakup informasi tentang jumlah keluarga dan individu yang digolongkan miskin yaitu yang ada dalam desil-1 dan desil-2 dalam ranking penduduk berdasar pendapatan, jumlah penduduk miskin berdasar usia, perempuan kepala keluarga, status pendidikan, tingkat pendidikan, kepemilikan fasilitas buang air besar (BAB), status pekerjaan, jenis pekerjaan, kepemilikan rumah, sumber air keluarga, dan penerangan keluarga.

Dengan kriteria tersebut diketahui bahwa dari total dua puluh delapan Kecamatan di Kabupaten Konawe, Kecamatan dengan jumlah keluarga desil 1 dan desil 2 terbanyak adalah : Kecamatan Wonggeduku (1.083 KK), Kecamatan Pondidaha (9.71 KK), dan Kecamatan Wawotobi (9.62 KK). Sedangkan jumlah terkecil berturut-turut adalah : Kecamatan Bondoala (83 KK), Kecamatan Lalonggasumeeto (132), dan Kecamatan Kapoiala (189 KK).

Dilihat dari jumlah individunya diketahui Kecamatan dengan jumlah terbesar meliputi : Kecamatan Wonggeduku (4912 jiwa), Kecamatan Pondidaha (4.422 jiwa), dan Kecamatan Wawotobi (4689 jiwa). Sedangkan jumlah terkecil meliputi : Kecamatan Bondoala (400 jiwa), Kecamatan Lalonggasumeeto (646 jiwa), dan Kecamatan Kapoiala (860 jiwa). Data selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 5. 1 Jumlah Keluarga Miskin Desil 1 dan Desil 2 per Kecamatan

No.	Kecamatan	Keluarga			Individu		
		Desil 1	Desil 2	D1+D2	Desil 1	Desil 2	D1+D2
1	Soropia	233	259	492	1254	1169	2423
2	Lalonggasumeeto	43	89	132	232	414	646
3	Sampara	191	210	401	1021	944	1965
4	Bondoala	30	53	83	156	244	400
5	Besulutu	465	275	740	2271	1117	3388
6	Kapoiala	93	96	189	438	422	860
7	Anggalomoare	87	103	190	476	476	952
8	Morosi	153	123	276	792	555	1347

PARAF KOORDINASI

No.	Kecamatan	Keluarga			Individu		
		Desil 1	Desil 2	D1+D2	Desil 1	Desil 2	D1+D2
9	Lambuya	224	230	454	1166	981	2147
10	Uepai	464	382	846	2380	1665	4045
11	Puriala	302	280	582	1511	1148	2659
12	Onembute	189	235	424	958	1037	1995
13	Pondidaha	527	444	971	2588	1834	4422
14	Wonggeduku	526	557	1083	2596	2316	4912
15	Amonggedo	352	359	711	1731	1545	3276
16	Wonggeduku Barat	371	473	844	1938	2146	4084
17	Wawotobi	447	515	962	2346	2343	4689
18	Meluhu	180	208	388	867	884	1751
19	Konawe	208	247	455	1142	1157	2299
20	Unaaha	167	220	387	948	1104	2052
21	Anggaberu	103	150	253	575	674	1249
22	Abuki	393	301	694	2001	1249	3250
23	Latoma	261	97	358	1310	361	1671
24	Tongauna	248	283	531	1312	1241	2553
25	Asinua	280	142	422	1380	519	1899
26	Padangguni	388	366	754	1903	1450	3353
27	Tongauna Utara	272	276	548	1297	1121	2418
28	Routa	208	97	305	1104	410	1514

Sumber : Bappeda Kab. Konawe, Status Kesejahteraan P3KE, Oktober 2024

A. Warga Miskin Berdasarkan Usia

Data warga miskin sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikelompokkan menurut usia, yang meliputi kelompok kurang dari 6 tahun, 6-14 tahun, 15-44 tahun, 45-59 tahun, dan 60 tahun ke atas. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah paling besar adalah warga miskin berusia 15-44 tahun sebanyak 36.214 jiwa, usia 6-14 tahun sebanyak 14.634 jiwa, usia di atas 45-59 tahun sebanyak 8644 jiwa. Selebihnya adalah usia anak-anak, yaitu usia kurang dari 6 tahun sebanyak 5855 jiwa dan usia 60 tahun ke atas sebanyak 2872 jiwa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mayoritas warga miskin ada pada usia produktif. Oleh karena itu penanganannya antara lain dapat dilakukan dengan pemberdayaan dan peningkatan produktivitas kerja mereka. Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.2 berikut.

PARAF KOORDINASI

Tabel 5. 2 Jumlah Warga Miskin Berdasarkan Usia

No.	Kecamatan	Usia (Tahun)				
		< 6	6-14	15-44	45-59	>60
1	Soropia	237	545	1289	258	94
2	Lalonggasumeeto	64	144	334	79	25
3	Sampara	165	458	1024	247	71
4	Bondoala	44	97	197	51	11
5	Besulutu	331	741	1750	434	132
6	Kapoiala	96	190	434	94	46
7	Anggalomoare	80	218	520	96	38
8	Morosi	113	323	709	153	49
9	Lambuya	178	471	1128	289	81
10	Uepai	381	902	2068	520	174
11	Puriala	271	534	1399	350	105
12	Onembute	196	410	1036	252	101
13	Pondidaha	464	954	2344	500	160
14	Wonggeduku	449	972	2626	645	220
15	Amonggedo	260	690	1691	428	207
16	Wonggeduku Barat	306	919	2194	522	143
17	Wawotobi	395	1087	2438	581	188
18	Meluhu	170	349	901	219	112
19	Konawe	188	502	1249	293	67
20	Unaaha	124	423	1119	303	83
21	Anggaberu	109	270	686	145	39
22	Abuki	248	688	1792	408	114
23	Latoma	136	317	921	206	91
24	Tongauna	321	912	2469	601	196
25	Asinua	143	362	1038	263	93
26	Padangguni	239	706	1771	478	159
27	Tongauna Utara	45	84	259	56	28
28	Routa	102	366	828	173	45
Jumlah		5.855	14.634	36.214	8.644	2.872

Sumber : Bappeda Kab. Konawe, Status Kesejahteraan P3KE, Oktober 2024

B. Perempuan Kepala Keluarga

Keluarga miskin yang kepala keluarganya perempuan, yaitu janda, pada umumnya mengalami kesulitan hidup yang lebih tinggi dibanding keluarga miskin yang suami-istrinya masih lengkap. Dalam hal ini jumlah perempuan kepala keluarga miskin

PARAF KOORDINASI

di Kabupaten Konawe sebanyak 876. Jumlah terbesar ada di Kecamatan Pondidaha sebanyak 67 orang, dan yang terkecil ada di Kecamatan Bondoala sebanyak 3 orang.

Dari kelompok usianya diketahui bahwa di seluruh Kabupaten Konawe perempuan kepala keluarga miskin terbanyak berusia 45-59 Tahun sebanyak 535 orang. Urutan kedua adalah usia kurang dari 45 tahun sebanyak 331 orang. Jumlah terkecil adalah perempuan kepala keluarga miskin yang berusia lebih dari 59 tahun, yaitu sebanyak 192 orang. Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.3.

Perempuan kepala keluarga dari kelompok usia kurang dari 45 tahun perlu mendapat perhatian tersendiri. Hal itu karena terdapat kemungkinan yang besar bahwa status janda itu disandang melalui proses perceraian hidup, bukan karena kematian suami. Jika status janda terjadi karena perceraian, berarti terdapat masalah dalam kehidupan keluarga mereka. Bukan tidak mungkin hal itu berkaitan dengan adanya perkawinan pada usia anak (nikah dini).

Selain perlu pendalaman tentang penyebab terjadinya banyak perceraian yang mengakibatkan banyak perempuan menjadi kepala keluarga miskin, diperlukan pula perhatian khusus berhubung janda pada usia kurang dari 45 tahun itu dalam klasifikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tergolong Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

Tabel 5. 3 Perempuan Kepala Keluarga

No.	Kecamatan	Jumlah	Usia < 45 Tahun	Usia 45-59 Tahun	Usia >59 Tahun
1	Soropia	33	12	10	11
2	Lalonggasumeeto	8	2	3	3
3	Sampara	18	4	8	6
4	Bondoala	3	0	1	2
5	Ecsulutu	60	23	32	5
6	Kapoiata	16	5	6	5
7	Anggalomoare	22	11	5	6
8	Morosi	23	8	9	6
9	Lambuya	27	12	10	5
10	Uepai	57	24	18	15
11	Puriala	33	9	19	5

PARAF KOORDINASI

12	Onembute	23	6	9	8
13	Pondidaha	67	31	27	9
14	Wonggeduku	50	21	18	11
15	Amonggedo	27	9	11	7
16	Wonggeduku Barat	69	25	31	13
17	Wawotobi	52	15	23	14
18	Meluhu	16	6	6	4
19	Konawe	32	16	13	3
20	Unaaha	37	14	16	7
21	Anggaberu	11	4	5	2
22	Abuki	44	23	13	8
23	Latoma	18	7	5	6
24	Tongauna	52	17	22	13
25	Asinua	22	5	11	6
26	Padangguni	29	12	13	4
27	Tongauna Utara	7	1	4	2
28	Routa	20	9	5	6
Jumlah		876	331	353	192

Sumber : Bappeda Kab. Konawe, Status Kesejahteraan P3KE, Oktober 2024

C. Status Pendidikan

Gambaran mengenai status Pendidikan warga miskin dipilih antara yang Drop Out (DO) dan Lulus Tidak Melanjutkan (LTM). Masing-masing pilihan dikelompokkan berdasar kelas, yaitu untuk Drop Out (DO) difokuskan di 2 jenjang sekolah; kelas 1 sampai kelas 5 (jenjang Sekolah Dasar), kelas 7 dan 8 (jenjang SMP). Kemudian untuk data Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) di 2 jenjang yaitu untuk kelas 6 (jenjang Sekolah Dasar) dan 9 (jenjang SMP). Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.4.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat anak usia sekolah di Kabupaten Konawe yang pada kenyataannya tidak bisa menyelesaikan sekolahnya dengan berbagai alasan. Hal ini perlu mendapat perhatian serius sebab berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang wajib belajar 9 tahun, berkaitan dengan masa depan generasi muda penerus pembangunan, serta yang paling penting berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.

PARAF KOORDINASI

Tabel E. 4 Status Drop Out (DO) dan Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) per Kecamatan

No.	Kecamatan	Drop Out (DO)									Lulus Tidak Melanjutkan (LTM)		Total
		Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Kelas 5	Kelas 6	Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Kelas 6	Kelas 9	
1	Soropia	4	2	1	1	5	0	1	7	7	27	36	91
2	Lalonggasumecto	0	1	0	1	1	0	0	0	6	10	3	22
3	Sampara	0	2	3	3	3	3	2	7	1	11	20	55
4	Bondoala	1	1	2	1	3	1	4	15	1	18	33	80
5	Besulutu	1	1	1	1	4	1	1	1	3	13	44	71
6	Kapoiala	0	0	0	2	1	1	1	3	1	17	16	42
7	Anggalomoare	2	0	1	0	0	1	3	1	0	3	8	19
8	Morosi	2	0	2	3	2	3	3	3	2	3	17	40
9	Lambuya	0	2	0	0	4	1	1	2	4	9	24	47
10	Uepai	0	1	1	2	4	7	3	3	1	27	26	75
11	Puriala	0	0	1	0	2	3	3	3	3	11	27	53
12	Onembute	1	1	1	5	6	3	2	0	5	18	50	92
13	Pondidaha	2	2	3	3	9	3	2	3	18	34	67	146
14	Wonggeduku	2	1	4	1	4	3	4	6	14	29	25	93
15	Aamonggedo	0	2	2	1	4	1	3	3	1	6	47	70
16	Wonggeduku Barat	0	1	0	2	3	6	1	7	1	15	9	45
17	Wawotobi	0	0	1	1	11	15	4	6	18	84	52	192
18	Meluhu	0	0	1	0	1	0	0	3	4	15	10	34
19	Konawe	1	0	0	2	6	2	2	6	3	41	29	92
20	Unaaha	3	4	4	8	7	4	8	8	9	36	43	134
21	Anggaberri	2	2	2	2	1	4	0	1	4	8	28	54

PARAF KOORDINASI

No.	Kecamatan	Drop Out (DO)									Lulus Tidak Melanjutkan (LTM)		Total
		Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Kelas 5	Kelas 6	Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Kelas 6	Kelas 9	
22	Abuki	0	1	0	2	6	0	3	5	2	9	29	57
23	Latoma	1	1	0	1	2	2	1	0	11	5	16	40
24	Tongauna	0	2	0	2	4	1	2	13	5	33	23	85
25	Asinua	0	1	0	0	3	8	0	0	0	12	5	29
26	Padangguni	0	0	0	0	0	2	2	3	0	13	15	35
27	Tongauna Utara	0	0	0	0	4	0	1	0	0	4	1	10
28	Routa	0	0	1	0	0	1	2	2	1	31	13	51
Jumlah		23	30	34	48	105	82	66	119	134	548	725	1854

Sumber : Verval DO dan LTM (pd.data.kemdikbud.go.i

PARAF KOORDINASI

D. Tingkat Pendidikan Terakhir

Tingkat Pendidikan terakhir yang diraih oleh warga miskin di Kabupaten Konawe dikelompokkan menurut jenjang Sekolah Dasar (SD dan sederajat), Sekolah Menengah Pertama (SMP dan sederajat), Sekolah Menengah Atas (SMA dan sederajat), serta jenjang Perguruan Tinggi.

Data menunjukkan bahwa pendidikan terakhir warga miskin paling banyak pada jenjang SD. Selanjutnya diikuti oleh jenjang SMA, SMP dan perguruan tinggi. Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.5.

Tabel 5. 5 Pendidikan Terakhir

No.	Kecamatan	Pendidikan Terakhir			
		SD	SMP	SMA/K	PT/Akademi
1	Soropia	503	341	285	13
2	Lalonggasumeeto	70	95	172	1
3	Sampara	290	304	358	16
4	Bondoala	63	69	74	1
5	Besulutu	571	479	591	51
6	Kapoiala	115	145	175	8
7	Anggalomoare	105	174	189	4
8	Morosi	259	231	198	6
9	Lambuya	419	303	402	25
10	Uepai	517	663	766	48
11	Puriala	552	453	367	14
12	Onembute	426	357	255	19
13	Pondidaha	797	618	736	42
14	Wonggeduku	991	754	754	28
15	Amonggedo	582	544	513	17
16	Wonggeduku Barat	587	653	835	24
17	Wawotobi	553	780	995	54
18	Meluhu	327	322	293	18
19	Konawe	191	442	504	11
20	Unaaha	232	345	503	19
21	Anggaberu	173	199	232	16
22	Abuki	567	493	589	33
23	Latoma	301	241	243	12
24	Tongauna	794	785	756	27

PARAF KOORDINASI

No.	Kecamatan	Pendidikan Terakhir			
		SD	SMP	SMA/K	PT/Akademi
25	Asinua	505	265	239	13
26	Padangguni	814	554	416	14
27	Tongauna Utara	134	68	51	7
28	Routa	336	176	209	20
Jumlah		11774	10853	11700	561

Sumber : Bappeda Kab. Konawe, Status Kesejahteraan P3KE, Oktober 2024

E. Kepemilikan Fasilitas BAB Keluarga

Kepemilikan fasilitas Buang Air Besar (BAB) merupakan salah satu indikator untuk menentukan kesejahteraan keluarga, khususnya berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan. Oleh karena itu kepemilikan fasilitas BAB pada warga miskin penting untuk diperhatikan.

Dari keseluruhan warga miskin di Kabupaten Konawe, sebagian besar (11.577 keluarga) sudah memiliki fasilitas BAB dengan septic tank yang artinya fasilitas BAB tersebut telah memenuhi standar kesehatan. Selanjutnya sebanyak 125 keluarga belum memiliki fasilitas BAB , sebanyak 1.834 keluarga masih menggunakan jamban umum atau jamban bersama, dan sebanyak 939 keluarga memiliki fasilitas BAB tanpa Septic Tank. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Konawe sangat perlu memberi perhatian khusus kepada 125 keluarga yang belum memiliki fasilitas BAB, dan tahap selanjutnya memberi bantuan kepada 939 keluarga yang menggunakan jamban tanpa septic tank. Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.6 berikut.

Tabel 5. 6 Kepemilikan Fasilitas BAB Keluarga

No	Kecamatan	Memiliki	Tidak Memiliki	Bersama	Tanpa Septic Tank
1	Soropia	257	0	155	80
2	Lalonggasumeeto	111	2	8	11
3	Sampara	338	0	43	20
4	Bondoala	69	0	12	2
5	Besulutu	539	11	134	56
6	Kapoiala	160	0	15	14
7	Anggalomoare	172	0	15	3



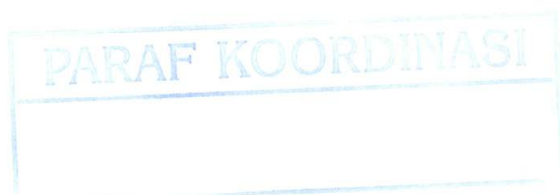
No	Kecamatan	Memiliki	Tidak Memiliki	Bersama	Tanpa Septic Tank
8	Morosi	205	14	30	27
9	Lambuya	384	0	60	10
10	Uepai	675	14	101	56
11	Puriala	500	5	41	36
12	Onembute	339	0	63	22
13	Pondidaha	784	15	110	62
14	Wonggeduku	887	13	123	60
15	Amonggedo	604	1	85	21
16	Wonggeduku Barat	658	0	146	40
17	Wawotobi	843	18	71	30
18	Meluhu	286	14	13	75
19	Konawe	406	0	42	7
20	Unaaha	333	0	22	32
21	Anggaberri	148	4	89	12
22	Abuki	570	0	81	43
23	Latoma	265	0	71	22
24	Tongauna	805	12	96	56
25	Asinua	344	0	76	2
26	Padangguni	580	0	85	89
27	Tongauna Utara	86	2	2	20
28	Routa	229	0	45	31
Jumlah		11577	125	1834	939

Sumber : Bappeda Kab. Konawe, Status Kesejahteraan P3KE, Oktober 2024

F. Status Pekerjaan

Gambaran mengenai status pekerjaan warga miskin di Kabupaten Konawe dirinci menurut kelompok usia, mulai dari usia 5-14 tahun, 15-59 tahun, hingga usia di atas 60 tahun. Pada bagian ini hanya ditampilkan kelompok usia 5-14 tahun dan 15-59 tahun dengan pertimbangan terdapat hal penting yang perlu diperhatikan dari kedua kelompok tersebut.

Usia 5-14 tahun adalah usia sekolah. Apabila pada usia tersebut terdapat warga yang berstatus bekerja, hal itu berarti mereka tidak bersekolah atau putus sekolah. Adapun usia 15-59 tahun merupakan usia produktif sehingga semestinya warga pada kelompok usia tersebut berstatus bekerja. Apabila warga pada usia 15-59 tahun berstatus tidak bekerja alias menganggur, hal



itu berarti ada beban bagi keluarga dan perlu menjadi perhatian dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Di Kabupaten Konawe terdapat sebanyak 77 warga berusia 5-14 tahun berstatus bekerja. Jumlah terbesar adalah di Kecamatan Tongauna (10 anak), Kecamatan Wonggeduku Barat dan Kecamatan Soropia (9 anak), dan Kecamatan Sampara (7 anak). Untuk kelompok usia 15-59 tahun terdapat sebanyak 25.193 orang yang berstatus tidak bekerja atau berstatus menganggur. Jumlah terbanyak adalah di Kecamatan Wawotobi sebanyak 1.751 orang, Kecamatan Pondidaha dan Kecamatan Tongauna sebanyak 1.690 orang, dan Kecamatan Wonggeduku sebanyak 1.661 orang. Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.7 berikut.

Tabel 5. 7 Status Pekerjaan

No	Kecamatan	Usia 5 -14 Tahun		Usia 15-59 Tahun		
		Jumlah	Bekerja	Jumlah	Bekerja	Tidak Bekerja
1	Soropia	623	9	1547	553	994
2	Lalonggasumeeto	164	1	413	146	267
3	Sampara	512	7	1271	494	777
4	Bondoala	107	0	248	114	134
5	Besulutu	834	1	2184	1092	1092
6	Kapoiala	215	2	528	197	331
7	Anggalomoare	242	3	616	217	399
8	Morosi	356	1	862	321	541
9	Lambuya	533	0	1417	481	936
10	Uepai	1028	2	2588	1076	1512
11	Puriala	630	1	1749	798	951
12	Onembute	473	1	1288	571	717
13	Pondidaha	1093	3	2844	1154	1690
14	Wonggeduku	1118	2	3271	1610	1661
15	Amonggedo	760	5	2119	1073	1046
16	Wonggeduku Barat	1028	9	2716	1197	1519
17	Wawotobi	1214	3	3019	1268	1751
18	Meluhu	401	1	1120	528	592
19	Konawe	563	4	1542	671	871
20	Unaaha	470	1	1422	398	1024
21	Anggaberu	307	1	831	392	439
22	Abuki	769	2	2200	965	1235

PARAF KOORDINASI

No	Kecamatan	Usia 5 -14 Tahun		Usia 15-59 Tahun		
		Jumlah	Bekerja	Jumlah	Bekerja	Tidak Bekerja
23	Latoma	355	1	1127	629	498
24	Tongauna	1008	10	3070	1380	1690
25	Asinua	398	0	1301	576	725
26	Padangguni	782	1	2249	1032	1217
27	Tongauna Utara	94	0	315	161	154
28	Routa	411	6	1001	571	430
Jumlah		16488	77	44858	19665	25193

Sumber : Bappeda Kab. Konawe, Status Kesejahteraan P3KE, Oktober 2024

G. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan warga miskin di Kabupaten Konawe meliputi petani, nelayan, pedagang, pegawai swasta, wiraswasta, pensiunan, pekerja lepas, dan lainnya. Pekerjaan yang paling banyak ditekuni warga miskin adalah petani, yaitu sebanyak 14.255 orang, disusul wiraswasta sebanyak 2.462 orang, dan pekerja lepas sebanyak 2.449 orang. Pada sisi lain terdapat 46.530 orang miskin yang berstatus tidak bekerja, yang berarti tidak memiliki sumber pendapatan. Kecamatan dengan jumlah warga miskin berstatus tidak bekerja terbanyak adalah Kecamatan Wawotobi (3.310 orang), Kecamatan Pondidaha (3.160 orang), dan Kecamatan Wonggeduku (3.143 orang).

Tabel 5. 8 Jenis Pekerjaan Warga Miskin

No	Kecamatan	Tidak Bekerja	Petani	Nelayan	Pedagang	Wiraswasta	Pekerja Lepas	Pegawai Swasta	Pensiunan	Lainnya
1	Soropia	1808	47	297	21	160	79	11	0	0
2	Lalonggasumeeto	489	9	46	8	33	33	24	4	0
3	Sampara	1420	206	1	10	138	138	50	2	0
4	Bondoala	277	50	1	1	34	14	23	0	0
5	Besulutu	2191	777	2	50	150	109	99	9	1
6	Kapoiala	640	93	15	6	47	20	38	1	0
7	Anggalomoare	705	76	2	13	68	67	18	3	0
8	Morosi	996	138	0	11	52	50	88	12	0
9	Lambuya	1618	439	0	9	44	25	12	0	0
10	Uepai	2859	843	2	42	119	120	47	11	2
11	Puriala	1787	608	34	14	99	92	18	5	2
12	Onembute	1358	354	1	8	139	133	2	0	0
13	Pondidaha	3160	738	6	56	219	155	65	23	0
14	Wonggeduku	3143	1389	6	79	108	93	50	44	0
15	Amonggedo	2046	846	3	48	149	154	27	3	0
16	Wonggeduku Barat	2777	742	36	31	218	234	42	4	0
17	Wawotobi	3310	803	2	84	168	195	115	9	3
18	Meluhu	1147	401	2	27	42	93	34	5	0

PARAF KOORDINASI

No	Kecamatan	Tidak Bekerja	Petani	Nelayan	Pedagang	Wiraswasta	Pekerja Lepas	Pegawai Swasta	Pensiunan	Lainnya
19	Konawe	1567	532	3	7	84	76	26	4	0
20	Unaaha	1601	196	0	13	115	45	78	4	0
21	Anggaberu	833	225	1	11	44	58	74	3	0
22	Abuki	2196	842	4	13	86	79	29	1	0
23	Latoma	959	670	0	1	12	13	16	0	0
24	Tongauna	2984	1092	3	44	121	151	77	27	0
25	Asinua	1250	565	1	5	24	46	6	2	0
26	Padangguni	2219	909	4	15	54	141	10	1	0
27	Tongauna Utara	295	141	0	12	5	5	12	1	1
28	Routa	895	524	0	21	30	31	13	0	0
Jumlah		46530	14255	472	660	2562	2449	1104	178	9

Sumber : Bappeda Kab. Konawe, Status Kesejahteraan P3KE, Oktober 2024

H. Kepemilikan Rumah

Kepemilikan rumah warga miskin di Kabupaten Konawe dipilah ke dalam empat kategori, yaitu milik sendiri, sewa/kontrak, bebas sewa/menumpang, dan lainnya. Sebagian terbesar keluarga miskin sudah menempati rumah milik sendiri. Selanjutnya terdapat 68 keluarga yang menyewa dan sebanyak 2.067 keluarga yang menempati rumah milik orang lain tanpa perlu menyewa. Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.9.

Yang perlu mendapat perhatian adalah keluarga miskin yang masuk dalam kategori lainnya. Kategori tersebut bermakna bahwa keluarga tersebut tidak memiliki rumah sendiri, tidak mengontrak dan tidak menempati rumah orang tanpa menyewa. Dengan kata lain, mereka belum memiliki hak pakai maupun hak milik atas rumah. Hal ini perlu mendapat perhatian dan menjadi prioritas dalam penanganan kemiskinan.

Tabel 5. 9 Kepemilikan Rumah

No	Kecamatan	Milik Sendiri	Sewa/Kontrak	Bebas Sewa/ Menumpang	Lainnya
1	Soropia	399	2	87	4
2	Lalonggasumeeto	118	0	13	1
3	Sampara	319	1	81	0
4	Bondoala	77	1	4	1
5	Besulutu	630	0	102	8
6	Kapoiala	155	5	27	2
7	Anggalomoare	163	1	21	5
8	Morosi	251	2	23	0
9	Lambuya	383	1	69	1

PARAF KOORDINASI

No	Kecamatan	Milik Sendiri	Sewa/Kontrak	Bebas Sewa/ Menumpang	Lainnya
10	Uepai	689	6	148	3
11	Puriala	521	0	61	0
12	Onembute	350	4	69	1
13	Pondidaha	811	1	156	3
14	Wonggeduku	929	2	147	5
15	Amonggedo	594	1	115	1
16	Wonggeduku Barat	703	3	136	2
17	Wawotobi	788	11	156	7
18	Meluhu	338	1	47	2
19	Konawe	393	1	60	1
20	Unaaha	336	13	32	6
21	Anggaberu	227	3	22	1
22	Abuki	575	1	109	9
23	Latoma	327	1	28	2
24	Tongauna	794	4	163	8
25	Asinua	362	0	57	3
26	Padangguni	644	1	109	0
27	Tongauna Utara	101	1	8	0
28	Routa	275	1	17	12
Jumlah		12252	68	2067	88

Sumber : Bappeda Kab. Konawe, Status Kesejahteraan P3KE, Oktober 2024

I. Sumber Air Keluarga

Akses ke sumber air pada keluarga miskin di Kabupaten Konawe diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu air kemasan/isi ulang, leding/PAM, sumber terlindung, sumber tak terlindung, dan kategori lainnya. Jumlah terbesar adalah keluarga miskin yang memiliki sumber air berupa sumber terlindung sebanyak 9.720 keluarga, keluarga yang menggunakan sumber air leding atau PAM sebanyak 1989 keluarga, keluarga yang menggunakan sumber air tak terlindung sebanyak 1215 keluarga, kategori lainnya sebanyak 898 keluarga, dan keluarga yang menggunakan sumber air kemasan atau isi ulang sebanyak 653 keluarga. Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.10.

Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat banyak keluarga yang tidak memiliki akses ke sumber air, yaitu sebanyak 898 keluarga. Selain itu, terdapat sebanyak 653 keluarga miskin

PARAF KOORDINASI

yang juga tidak memiliki sumber air dan pemenuhan kebutuhan airnya dilakukan dengan membeli air kemasan atau air isi ulang. Dengan demikian keluarga miskin tersebut harus menanggung beban pengeluaran yang lebih besar.

Tabel 5. 10 Sumber Air Keluarga

No	Kecamatan	Kemasan/ Isi Ulang	Leding / PAM	Sumber terlindung	Sumber tak terlindung	Lainnya
1	Soropia	69	165	114	36	108
2	Lalonggasumeeto	12	71	32	7	10
3	Sampara	12	59	266	11	53
4	Bondoala	12	23	25	1	22
5	Besulutu	13	75	437	174	41
6	Kapoiala	29	42	68	0	50
7	Anggalomoare	5	0	176	8	1
8	Morosi	81	46	105	10	34
9	Lambuya	1	12	421	18	2
10	Uepai	18	82	701	21	24
11	Puriala	79	98	392	10	3
12	Onembute	3	138	216	59	8
13	Pondidaha	12	2	848	98	11
14	Wonggeduku	31	3	852	188	9
15	Amonggedo	3	85	536	81	6
16	Wonggeduku Barat	25	82	677	44	16
17	Wawotobi	89	1	760	100	12
18	Meluhu	50	78	240	12	8
19	Konawe	2	0	424	19	10
20	Unaaha	2	4	364	14	3
21	Anggaberri	45	98	97	12	1
22	Abuki	0	237	350	33	74
23	Latoma	0	209	5	2	142
24	Tongauna	22	29	806	60	52
25	Asinua	0	64	203	5	150
26	Padangguni	4	53	511	156	30
27	Tongauna Utara	34	0	56	20	0
28	Routa	0	233	38	16	18
Jumlah		653	1989	9720	1215	898

Sumber : Bappeda Kab. Konawe, Status Kesejahteraan P3KE, Oktober 2024

PARAF KOORDINASI

J. Jenis Penerangan

Jenis penerangan yang digunakan oleh keluarga miskin di Kabupaten Konawe yaitu penerangan dengan listrik PLN, penerangan listrik non PLN, dan penerangan bukan listrik. Penerangan listrik non PLN adalah penerangan listrik tetapi keluarga itu tidak/belum berlangganan dari PLN. Keluarga yang menggunakan penerangan listrik non PLN dimungkinkan menggunakan sambungan listrik milik tetangga, dimana dari segi keamanan kurang terjamin. Adapun penerangan bukan listrik artinya penerangan tradisional semisal lampu minyak.

Data menunjukkan bahwa pada umumnya warga miskin di Kabupaten Konawe sudah menggunakan penerangan listrik PLN, yaitu sebanyak 11.669 keluarga. Sementara itu sebanyak 2.088 keluarga menggunakan listrik non PLN dan sebanyak 718 keluarga menggunakan penerangan bukan listrik. Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.11 berikut.

Tabel 5. 11 Sumber Air Keluarga

No	Kecamatan	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik
1	Soropia	376	97	19
2	Lalonggasumeeto	121	10	1
3	Sampara	364	33	4
4	Bondoala	56	22	5
5	Besulutu	623	72	45
6	Kapoiala	163	22	4
7	Anggalomoare	162	28	0
8	Morosi	211	54	11
9	Lambuya	418	26	10
10	Uepai	694	124	28
11	Puriala	486	87	9
12	Onembute	347	57	20
13	Pondidaha	864	93	14
14	Wonggeduku	925	115	43
15	Amonggedo	584	122	5
16	Wonggeduku Barat	703	126	15
17	Wawotobi	804	138	20
18	Meluhu	278	107	3
19	Konawe	401	51	3
20	Unaaha	355	32	0

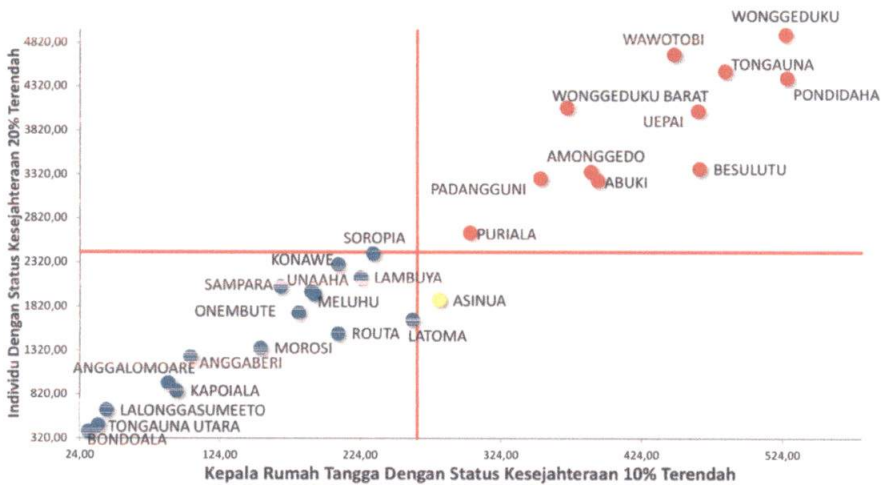
PARAF KOORDINASI

No	Kecamatan	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik
21	Anggaberi	209	39	5
22	Abuki	608	48	38
23	Latoma	137	1	220
24	Tongauna	752	174	43
25	Asinua	347	39	36
26	Padangguni	612	116	26
27	Tongauna Utara	65	45	0
28	Routa	4	210	91
Jumlah		11669	2088	718

Sumber : Bappeda Kab. Konawe, Status Kesejahteraan P3KE, Oktober 2024

Berdasarkan pemetaan data kemiskinan desil 1 dan desil 2 dengan perbandingan kecamatan pada tabel diatas, dalam rangka menentukan lokasi prioritas yang akan menjadi pilihan pelaksanaan program-program prioritas untuk penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini dimulai dengan mengidentifikasi sebaran masyarakat miskin di Kabupaten Konawe. Selanjutnya dilakukan analisa berdasarkan indikator diatas. Keluaran dari analisa ini adalah lokasi permasalahan bidang-bidang terkait dengan kemiskinan dengan sebaran desil 1 dan desil 2 di Kabupaten Konawe.

Gambar 5.1. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Kepala Rumah Tangga Desil 1 dan Individu Desil 2 Kab. Konawe



PARAF KOORDINASI

Dari gambar diatas memperlihatkan bahwa prioritas pertama penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe terdiri dari 11 Kecamatan yaitu : Wonggeduku, Wawotobi, Tongauna, Pondidaha, Wonggeduku Barat, Uepai, Amonggedo, Padangguni, Abuki, Besulutu dan Puriala. Sedangkan Kecamatan Asinua menjadi satu-satunya kecamatan yang berada pada posisi prioritas ketiga dalam gambar diatas. Selanjutnya sisanya berada pada prioritas keempat yang terdiri dari Kecamatan : Soropia, Konawe, Sampara, Unaaha, Lambuya, Meluhu, Onembute, Routa, Latoma, Morosi, Anggaber, Anggalomoare, Kapoiala, Lalonggasumeeto, Tongauna Utara, dan Bondoala.

Selanjutnya jika dilihat dari hasil analisa, kemudian dilakukan overlay hingga ke skala prioritas kecamatan dengan status wilayah merah atau prioritas pertama, dapat ditampilkan wilayah desa/kelurahan yang memiliki capaian dengan status wilayah merah atau prioritas pertama menjadi wilayah yang diprioritaskan.

Tabel 5.11 Hasil Analisa Desa Pada Prioritas Pertama Kabupaten

Kode Kec.	Kode Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Desa /Kelurahan	Prioritas
74.02.19	74.02.19.1009	Wonggeduku	Puuduria	1
74.02.19	74.02.19.2015	Wonggeduku	Tetemotaha	1
74.02.19	74.02.19.2004	Wonggeduku	Duriaasi	1
74.02.19	74.02.19.2006	Wonggeduku	Laloosu	1
74.02.19	74.02.19.2010	Wonggeduku	Wawosolo	1
74.02.19	74.02.19.2017	Wonggeduku	Bendewuta	1
74.02.19	74.02.19.2026	Wonggeduku	Tawarolondo	1
74.02.19	74.02.19.2012	Wonggeduku	Wawonggoloe	2
74.02.19	74.02.19.2008	Wonggeduku	Wawoone	4
74.02.19	74.02.19.2019	Wonggeduku	Lalohao	4
74.02.19	74.02.19.2028	Wonggeduku	Anggoro	4
74.02.19	74.02.19.2020	Wonggeduku	Wukusao	4
74.02.19	74.02.19.2016	Wonggeduku	Dawi-dawi	4
74.02.19	74.02.19.2027	Wonggeduku	Polandangi	4
74.02.19	74.02.19.2018	Wonggeduku	Langgonawe	4
74.02.19	74.02.19.2029	Wonggeduku	Tetewonua	4
74.02.03	74.02.03.1002	Wawotobi	Inalahi	1
74.02.03	74.02.03.2013	Wawotobi	Nario Indah	1
74.02.03	74.02.03.2025	Wawotobi	Karandu	1
74.02.03	74.02.03.1010	Wawotobi	Palarahi	1
74.02.03	74.02.03.1008	Wawotobi	Kulahi	1
74.02.03	74.02.03.2018	Wawotobi	Analahambuti	1

PARAF KOORDINASI

74.02.03	74.02.03.1019	Wawotobi	Nohu-Nohu	1
74.02.03	74.02.03.2032	Wawotobi	Kukuluri	1
74.02.03	74.02.03.1009	Wawotobi	Ranoeya	2
74.02.03	74.02.03.2026	Wawotobi	Korumba	3
74.02.03	74.02.03.1011	Wawotobi	Kasupute	4
74.02.03	74.02.03.1006	Wawotobi	Lalosabila	4
74.02.03	74.02.03.2017	Wawotobi	Anggoota	4
74.02.03	74.02.03.1007	Wawotobi	Hopa-Hopa	4
74.02.03	74.02.03.2031	Wawotobi	Kasumewuho	4
74.02.03	74.02.03.1028	Wawotobi	Puusinauwi	4
74.02.03	74.02.03.1027	Wawotobi	Bose-Bose	4
74.02.03	74.02.03.1001	Wawotobi	Wawotobi	4
74.02.03	74.02.03.1020	Wawotobi	Inolobu	4
74.02.15	74.02.15.2007	Tongauna	Asao	1
74.02.15	74.02.15.2018	Tongauna	Ambepulu	1
74.02.15	74.02.15.1002	Tongauna	Mataiwoi	1
74.02.15	74.02.15.1001	Tongauna	Tongauna	1
74.02.15	74.02.15.1005	Tongauna	Mekarsari	2
74.02.15	74.02.15.2012	Tongauna	Andeposandu	3
74.02.15	74.02.15.2013	Tongauna	Momea	4
74.02.15	74.02.15.1003	Tongauna	Puosu	4
74.02.15	74.02.15.1004	Tongauna	Sendang Mulya Sari	4
74.02.15	74.02.15.2006	Tongauna	Lalonggowuna	4
74.02.04	74.02.04.2031	Pondidaha	Belatu	1
74.02.04	74.02.04.2046	Pondidaha	Lalodangge	1
74.02.04	74.02.04.2016	Pondidaha	Mumundowu	1
74.02.04	74.02.04.2039	Pondidaha	Wawolemo	1
74.02.04	74.02.04.2034	Pondidaha	Amesiu	1
74.02.04	74.02.04.2051	Pondidaha	Wonua Monapa	1
74.02.04	74.02.04.2013	Pondidaha	Hongoa	2
74.02.04	74.02.04.2045	Pondidaha	Sulemandara	3
74.02.04	74.02.04.2035	Pondidaha	Puumbinisi	3
74.02.04	74.02.04.2049	Pondidaha	Lalonggotomi	3
74.02.04	74.02.04.2019	Pondidaha	Ahuawatu	4
74.02.04	74.02.04.2048	Pondidaha	Laloika	4
74.02.04	74.02.04.2050	Pondidaha	Wonua Mandara	4
74.02.04	74.02.04.2030	Pondidaha	Ambulanu	4
74.02.04	74.02.04.2047	Pondidaha	Wawolahambuti	4
74.02.04	74.02.04.2052	Pondidaha	Lohonggumbi	4
74.02.04	74.02.04.1001	Pondidaha	Pondidaha	4
74.02.04	74.02.04.2025	Pondidaha	Tirawuta	4
74.02.41	74.02.41.2004	Wonggeduku Barat	Tobimeita	1

PARAF KOORDINASI

74.02.41	74.02.41.2001	Wonggeduku Barat	Wonggeduku	2
74.02.41	74.02.41.2009	Wonggeduku Barat	Linonggasai	3
74.02.41	74.02.41.2010	Wonggeduku Barat	Lambang	4
74.02.41	74.02.41.2005	Wonggeduku Barat	Kasukia	4
74.02.41	74.02.41.2006	Wonggeduku Barat	Baruga	4
74.02.41	74.02.41.2007	Wonggeduku Barat	Teteona	4
74.02.41	74.02.41.2008	Wonggeduku Barat	Ambuwu	4
74.02.41	74.02.41.2003	Wonggeduku Barat	Waturay	4
74.02.41	74.02.41.2002	Wonggeduku Barat	Puday	4
74.02.41	74.02.41.2011	Wonggeduku Barat	Lahotutu	4
74.02.41	74.02.41.2012	Wonggeduku Barat	Lamokuni	4
74.02.41	74.02.41.2014	Wonggeduku Barat	Anggadola	4
74.02.41	74.02.41.2013	Wonggeduku Barat	Ranotondobu	4
74.02.18	74.02.18.2011	Uepai	Anggopiu	1
74.02.18	74.02.18.2006	Uepai	Langgomea	1
74.02.18	74.02.18.2007	Uepai	Rawua	1
74.02.18	74.02.18.2012	Uepai	Tamesandi	1
74.02.18	74.02.18.2010	Uepai	Tawamelewe	1
74.02.18	74.02.18.2019	Uepai	Puuroda Jaya	1
74.02.18	74.02.18.1001	Uepai	Uepai	2
74.02.18	74.02.18.2002	Uepai	Ameroro	4
74.02.18	74.02.18.2008	Uepai	Baruga	4
74.02.18	74.02.18.2016	Uepai	Kasaeda	4
74.02.18	74.02.18.2009	Uepai	Amaroa	4
74.02.18	74.02.18.2003	Uepai	Tawarotobota	4
74.02.18	74.02.18.2017	Uepai	Tanggondipo	4
74.02.18	74.02.18.2013	Uepai	Humboto	4
74.02.18	74.02.18.2004	Uepai	Olo-Oloho	4
74.02.18	74.02.18.2018	Uepai	Panggulawu	4
74.02.18	74.02.18.2015	Uepai	Anggawo	4
74.02.18	74.02.18.2005	Uepai	Matahoalu	4

PARAF KOORDINASI

74.02.28	74.02.28.2001	Amonggedo	Anahinunu	1
74.02.28	74.02.28.2002	Amonggedo	Ulu Benua	1
74.02.28	74.02.28.2005	Amonggedo	Lalonona	1
74.02.28	74.02.28.2011	Amonggedo	Mendikonu	1
74.02.28	74.02.28.2012	Amonggedo	Amandete	1
74.02.28	74.02.28.2009	Amonggedo	Matabura	2
74.02.28	74.02.28.2003	Amonggedo	Puasana	4
74.02.28	74.02.28.2010	Amonggedo	Wawohine	4
74.02.28	74.02.28.2007	Amonggedo	Dunggua	4
74.02.28	74.02.28.2004	Amonggedo	Watulawu	4
74.02.28	74.02.28.1013	Amonggedo	Amonggedo Baru	4
74.02.28	74.02.28.2014	Amonggedo	Mataiwoi	4
74.02.28	74.02.28.2008	Amonggedo	Benua	4
74.02.28	74.02.28.2006	Amonggedo	Amonggedo	4
74.02.28	74.02.28.2015	Amonggedo	Lalombonda	4
74.02.20	74.02.20.2001	Besulutu	Lawonua	1
74.02.20	74.02.20.2011	Besulutu	Andomesinggo	1
74.02.20	74.02.20.2012	Besulutu	Puulowaru	1
74.02.20	74.02.20.2006	Besulutu	Ulupohara	1
74.02.20	74.02.20.2010	Besulutu	Onembute	2
74.02.20	74.02.20.2013	Besulutu	Puundoho	2
74.02.20	74.02.20.1003	Besulutu	Besulutu	2
74.02.20	74.02.20.2016	Besulutu	Lalowulo	4
74.02.20	74.02.20.2002	Besulutu	Amosilu	4
74.02.20	74.02.20.2015	Besulutu	Waworaha	4
74.02.20	74.02.20.2014	Besulutu	Punggaluku	4
74.02.20	74.02.20.2009	Besulutu	Silea	4
74.02.20	74.02.20.2004	Besulutu	Laloumera	4
74.02.20	74.02.20.2008	Besulutu	Ranomolua	4
74.02.20	74.02.20.2007	Besulutu	Labela	4
74.02.20	74.02.20.2005	Besulutu	Asunde	4
74.02.38	74.02.38.2002	Padangguni	Matahori	1
74.02.38	74.02.38.2003	Padangguni	Sambaosu	1
74.02.38	74.02.38.2004	Padangguni	Matanggorai	1
74.02.38	74.02.38.2007	Padangguni	Langgea	2
74.02.38	74.02.38.2005	Padangguni	Alosika	3
74.02.38	74.02.38.2006	Padangguni	Mekar Jaya	3
74.02.38	74.02.38.2008	Padangguni	Aleuti	4
74.02.38	74.02.38.2011	Padangguni	Padang Mekar	4
74.02.38	74.02.38.2001	Padangguni	Atodopi	4
74.02.38	74.02.38.2010	Padangguni	Padangguni	4
74.02.38	74.02.38.2009	Padangguni	Garuda	4
72.02.10	74.02.10.2008	Abuki	Asolu	1
72.02.10	74.02.10.1001	Abuki	Abuki	1

PARAF KOORDINASI

72.02.10	74.02.10.2042	Abuki	Anggoro	1
72.02.10	74.02.10.2007	Abuki	Sambeani	1
72.02.10	74.02.10.2012	Abuki	Walay	2
72.02.10	74.02.10.2040	Abuki	Padangguni Utama	3
72.02.10	74.02.10.2015	Abuki	Epeea	4
72.02.10	74.02.10.2035	Abuki	Unaasi Jaya	4
72.02.10	74.02.10.2038	Abuki	Kasuwura Indah	4
72.02.10	74.02.10.2039	Abuki	Arubia Jaya	4
72.02.10	74.02.10.2024	Abuki	Kumapo	4
72.02.10	74.02.10.2009	Abuki	Punggaluku	4
74.02.17	74.02.17.2009	Puriala	Puusangi	1
74.02.17	74.02.17.2012	Puriala	Tetewatu	1
74.02.17	74.02.17.2004	Puriala	Lalonggatu	1
74.02.17	74.02.17.2003	Puriala	Sonai	1
74.02.17	74.02.17.2010	Puriala	Mokaleleo	2
74.02.17	74.02.17.2016	Puriala	Wawosanggula	4
74.02.17	74.02.17.2006	Puriala	Wonua Morome	4
74.02.17	74.02.17.2014	Puriala	Puuhopa	4
74.02.17	74.02.17.2008	Puriala	Watusa	4
74.02.17	74.02.17.2001	Puriala	Puriala	4
74.02.17	74.02.17.2007	Puriala	Ahuawali	4
74.02.17	74.02.17.2011	Puriala	Unggulino	4
74.02.17	74.02.17.2015	Puriala	Lalonaha	4
74.02.17	74.02.17.2013	Puriala	Tetahaka	4
74.02.17	74.02.17.2005	Puriala	Poanaha	4
74.02.17	74.02.17.1002	Puriala	Watundehoa	4

PARAF KOORDINASI

BAB VI PENUTUP

Kemiskinan merupakan permasalahan yang tidak hanya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Kabupaten Konawe, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan/pelaku Pembangunan (*stakeholders*) termasuk didalamnya adalah unsur swasta, sektor bisnis, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Non Pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi dan komponen lainnya, sehingga komunikasi dalam Penanggulangan Kemiskinan perlu dijalin dan ditingkatkan melalui koordinasi secara rutin. Upaya Penanggulangan Kemiskinan diarahkan untuk mendidik Masyarakat miskin menemukan dan mengenal potensi yang dimilikinya baik secara individu, keluarga maupun lingkungan sekitarnya yang dapat digunakan secara mandiri untuk modal dasar kesejahteraan hidup.

RPKD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan kelembagaan dan Sumber daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah disusun sebagai penjabaran dari strategi dan program Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. RPKD menjadi Bagian dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah terdiri atas 4 (empat) strategi, yaitu :

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Dari strategi tersebut kemudian dijabarkan kedalam program yang dilaksanakan untuk kebijakan Penanggulangan kemiskinan yaitu : Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban

PARAF KOORDINASI

hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin dan Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Dokumen RPKD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 memberikan petunjuk mengenai prioritas program Penanggulangan Kemiskinan sehingga angka kemiskinan dapat menurun beserta indikator lainnya yang terkait dengan kemiskinan. Target penurunan kemiskinan Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 yakni dari 12,27 (dua belaskoma dua puluh tujuh) menjadi 8,07 (delapan koma nol tujuh) dapat terwujud. Diharapkan dengan disusunnya RPKD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi acuan dan memberikan petunjuk mengenai perencanaan penanggulangan kemiskinan jangka menengah Daerah yang efektif, efisien dan terpadu bagi seluruh pelaku pembangunan di Daerah.

